

**KRITIK TERHADAP STRATEGI PENGUATAN MODERASI
BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA: ANALISIS WACANA
KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi
Aqidah Dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun Oleh:

Hafid Budi Cahyono

(E91219077)

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Kritik Terhadap Strategi Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough” yang ditulis oleh Hafid Budi Cahyono ini telah disetujui pada tanggal 17 Juli 2023.

Surabaya, 17 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag.

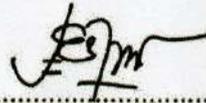
NIP: 196303271993031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Kritik Terhadap Strategi Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough” yang ditulis oleh Hafid Budi Cahyono telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 13 Juli 2023.

Tim penguji:

Dr. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag.
NIP. 196303271993031004



Isa Anshori, M.Ag.
NIP 197306042005011007



Muchammad Helmi Umam, S.Ag, M.Hum.
NIP. 197905042009011010



Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil.I.
NIP. 198109152009011011



Surabaya, 17 Juli 2023

Dekan



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.
NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hafid Budi Cahyono
NIM : E91219077
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : hafidcahyono0910@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kritik Terhadap Strategi Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama: Analisis Wacana

Kritis Norman Fairclough

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2023

Penulis

(Hafid Budi Cahyono)

ABSTRAK

Judul : Kritik Terhadap Strategi Penguatan Moderasi Beragama
Kementerian Agama: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough
Nama : Hafid Budi Cahyono
NIM : E91219077
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat Islam

Penelitian ini mengkaji tentang strategi penguatan moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI dengan berfokus pada kritik. Pada teori AWK Norman Fairclough dijelaskan bahwa penggunaan bahasa atau teks selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga dapat digunakan sebagai sarana dalam menyampaikan sebuah wacana atau ideologi yang sering kali terselip di dalamnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan kebijakan strategi penguatan moderasi beragama bertujuan untuk menurunkan konflik yang mengatasnamakan agama di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu; untuk mengetahui kritik strategi penguatan moderasi beragama Kementerian Agama RI dengan perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, akan tetapi metode penelitian kualitatif ini tidak seperti biasanya yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berbasis *library research*. Hal pertama yang bisa dilakukan dalam penelitian yang berbasis *library research* adalah dengan cara melakukan observasi dengan mengumpulkan berbagai data yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima strategi yang digunakan Kementerian Agama dalam menjalankan arah kebijakan strategi penguatan moderasi beragama di Indonesia yaitu 1) Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah, 2) Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, 3) Penyelarasan relasi agama dan budaya, 4) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan 5) Pengembangan ekonomi dan Sumber daya Keagamaan. Akibat dari diterbitkan kebijakan tersebut tentu menimbulkan interpretasi pro dan kontra dalam masyarakat. Pada penelitian ini berisi himpunan dari berbagai oknum atau kelompok yang cenderung kontra terhadap kebijakan tersebut.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Kritik, Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Kajian Terdahulu.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II MODERASI BERAGAMA DAN ANALISIS WACANA KRITIS	
NORMAN FAIRCLOUGH.....	20
A. Moderasi Beragama.....	20
B. Analisis Wacana Kritis.....	25
C. Teori Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.....	31
BAB III PETA JALAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA	
KEMENTERIAN AGAMA.....	36
A. Dasar Hukum dalam Moderasi Beragama.....	36
B. Strategi Penguatan Moderasi Beragama.....	38
C. Implementasi Program Kemenag dalam Moderasi beragama.....	42
D. Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama.....	54

BAB IV ANALISIS WACANA KRITIS STRATEGI PENGUATAN

MODERASI BERAGAMA 59

A. Analisis Teks 59

B. Praktik Wacana 67

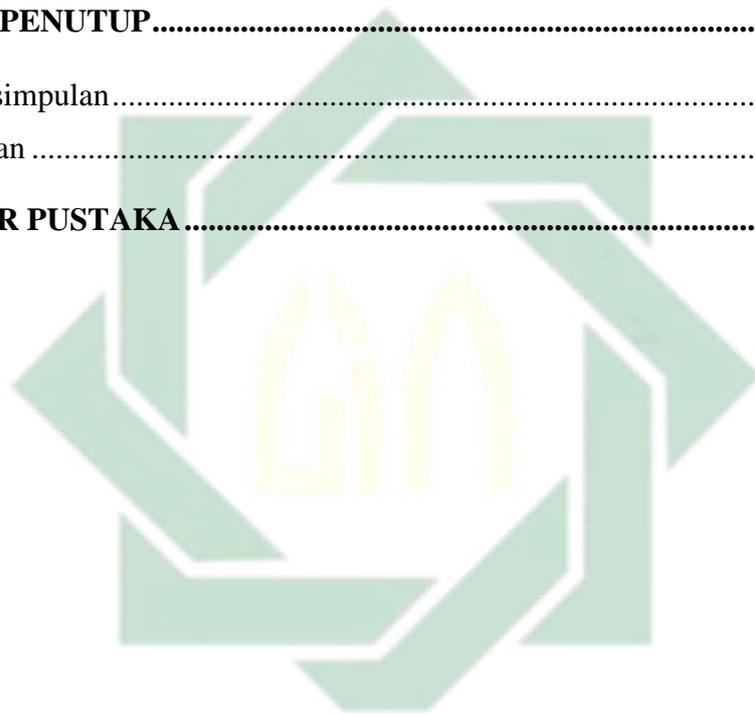
C. Praktik Sosiokultural 79

BAB V PENUTUP89

A. Kesimpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA92



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang bisa disebut sebagai negara majemuk atau multikultural, hal tersebut bisa dilihat dari berbagai corak agama, suku, bahasa, dan budaya yang beraneka ragam. Maka tidak heran jika Indonesia disebut juga sebagai negara heterogen karena memiliki keberagamannya yang melimpah.¹ Kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk memiliki pengaruh positif maupun negatif dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Pengaruh positifnya adalah jika semua bangsa Indonesia ini dapat menerima keberagaman ini dengan baik, maka akan tercipta keharmonisan dan kedamaian yang sangat indah dalam suatu bangsa Indonesia. Begitu juga sebaliknya, pengaruh negatifnya adalah jika keberagaman ini tidak dijaga dan diakui oleh negara atau masyarakat dengan baik, maka akan menimbulkan dampak negatif yang sangat mengerikan. Salah satu dampak paling buruk yang bisa diakibatkannya adalah perpecahan yang dapat mengakibatkan peperangan antar suku maupun umat beragama.

Kemudian didukung dengan terjadinya globalisasi yang membuat hubungan bangsa kita dengan bangsa asing semakin terjalin dengan erat. Pada awal abad ke-20 era globalisasi mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dikarenakan pada saat itu mulai berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi membuat jarak antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing menjadi semakin

¹ B. Kusumohamidjojo, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 45.

tipis. Banyaknya interaksi antar orang maupun kelompok menjadikan informasi yang beredar menjadi sulit dikendalikan di ranah media sosial.²

Selanjutnya kasus radikalisme di Indonesia yang relatif sering terjadi pada beberapa tahun belakangan ini. Menurut Irjen Pol Ibnu Suhaendra, selaku Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan BNPT, menjelaskan bahwa kasus teror sejak tahun 2017-2022 kasus ancaman terorisme di Indonesia mengalami pergerakan yang fluktuatif. “Selama lima tahun terakhir, tren ancaman terorisme di Indonesia bergerak secara fluktuatif. Meningkat pada 2019, lalu menurun pada 2020, dan meningkat lagi pada 2022 berdasarkan Laporan GTI tahun 2022,” jelasnya.³

Maka dari itu salah cara pencegahan aksi terorisme yang terjadi akibat adanya konflik antar umat beragama adalah perlunya kegiatan sosialisasi tentang narasi kerukunan seluruh umat beragama di Indonesia. Setelah itu diharapkan para tokoh lintas agama harus dirangkul dan berkumpul bersama agar harmoni kerukunan di Indonesia bisa terus dijaga. Sehingga jika semua para pemuka agama dapat hidup bersama dan dapat menjaga kerukunan maka kedepannya para pengikutnya juga bisa hidup dengan rukun.⁴

Oleh sebab itu semua warga Indonesia dari berbagai agama maupun suku yang berbeda-beda mau tidak mau harus menerapkan konsep beragama yang bersifat moderat, Meskipun istilah kata yang digunakan dalam moderasi beragama

² Donny Ernawam, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 32, Vol. 1, No. 1 (Desember, 2017), 6.

³ Admin, “Laporkan Analisis Perkembangan Aksi Terorisme di Indonesia, BNPT Melalui Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Hadiri RDP Dengan Komisi III DPR RI”, <https://www.bnpt.go.id/laporkan-analisis-perkembangan-aksi-terorisme-di-indonesia-bnpt-melalui-deputi-bidang-penindakan-dan-pembinaan-kemampuan-hadiri-rdp-dengan-komisi-iii-dpr-ri>, Diakses pada 15 Desember 2022.

⁴ Febrina Yasmin Salsabila, “Radikalisme Sebagai Bibit Perpecahan Antar Umat Beragama,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2019), 99.

setiap agama berbeda-beda akan tetapi maksud dan tujuannya haruslah sama untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian Kementerian Agama (selanjutnya disebut dengan Kemenag) juga merencanakan tentang adanya wacana “Moderasi Beragama” dicanangkan oleh Kemenag dan dapat mengorganisir berbagai urusan agama-agama di Indonesia, untuk mendorong terciptanya moderasi beragama di Indonesia yang dimulai pada tahun 2019.⁵

Kita semua harus menyadari bahwa peran moderasi beragama tidak bisa dilakukan secara sendirian. Perlu juga diketahui bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan ucapan-ucapan tertulis saja dalam menciptakan moderasi beragama. Selain itu, dalam hal ini sangat penting untuk menghadirkan orang-orang yang berpengaruh dan menyadari betul akan dinamika modernitas, misalnya orang-orang yang dihadirkan dan sering muncul di media *online* maupun elektronik, seperti: para pendidik, pemimpin ormas, jurnalis, pemuka agama, dan pendakwah yang bisa dijadikan sebagai *key people* dalam menyukseskan moderasi beragama.⁶

Sehingga demi tercapainya hal tersebut maka diperlukan adanya strategi penguatan moderasi beragama. Sehingga Kemenag membuat suatu perencanaan yang matang dan dapat diukur dengan parameter yang jelas tentang sosialisasi narasi moderasi beragama. Selanjutnya, pihak Kemenag secara resmi membuat sebuah buku pedoman dalam strategi menguatkan moderasi beragama di Indonesia yang ada dalam buku yang Berjudul “Peta Jalan (Roadmap) Penguatan

⁵ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), ix.

⁶ Sauqi Futaqi dan Saepudin Mashuri, “Religious Moderation Cyber: Sebuah Strategi Pengarusutamaan Melalui Literasi Media Baru,” *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 15, No. 2 (Juli, 2021), 192.

Moderasi Beragama Kemenag Tahun 2020-2024” yang digunakan sebagai pedoman dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia. Penyusunan peta jalan ini dibuat setelah melalui proses diskusi yang sangat panjang dengan para *stakeholder* yang ahli dengan bidangnya baik dari masyarakat sipil maupun dari pihak lembaga atau kementerian yang terkait.⁷

Seperti halnya sebuah kebijakan yang lain, terdapat pro dan kontra dalam suatu kebijakan. Sebagai contohnya dalam kebijakan strategi penguatan moderasi beragama Kemenag. Meskipun berbagai kelompok ormas besar dan pemuka agama di Indonesia setuju dan mendukung konsep moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kemenag. Namun terdapat oknum atau kelompok yang cenderung menerima, sekaligus merasa pesimis terhadap hasil kinerja strategi penguatan moderasi beragama Kemenag. Karena dalam banyak riset menyebutkan bahwa radikalisme dan ekstremisme yang terjadi di Indonesia akibat dari kurangnya pemerataan ekonomi dan terjadinya perebutan kekuasaan dalam politik.⁸

Selanjutnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan studi penelitian tentang strategi penguatan moderasi beragama yang ada dalam buku “Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama”. Dalam menciptakan masyarakat yang rukun dan damai tidaklah mudah. Karena faktor yang menyebabkan konflik yang terjadi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh motif agama saja. terdapat banyak sekali

⁷ Tim Pokja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), iv.

⁸ Ma'mun Murod Al-Barbasy, “*Moderasi Beragama Tanpa Makna*”, <https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpa-makna/>, diakses pada 15 Juli 2023.

faktor dan motif tersembunyi dibalik konflik tersebut, seperti faktor: ekonomi, politik dan sosial-budaya, lainnya.

Selanjutnya peneliti tertarik untuk menganalisis strategi penguatan moderasi beragama dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (selanjutnya disingkat menjadi AWK). Karena pada teori AWK Norman Fairclough dijelaskan bahwa pada zaman modern ini penggunaan bahasa atau teks selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga memiliki peranan yang tidak kalah penting yaitu bahasa dapat digunakan sebagai sarana dalam menyampaikan sebuah wacana atau ideologi yang sering kali terselip di dalamnya. Oleh sebab itu, Norman Fairclough mencoba mengintegrasikan antara penggunaan bahasa dan praksis sosial yang ada di masyarakat. Kemudian dengan bahasa juga pemerintah dapat memproduksi makna dalam kehidupan sosial agar pemerintah dapat menerapkan berbagai instrumen kekuasaannya.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penguatan moderasi beragama Kementerian Agama RI?
2. Bagaimana kritik strategi penguatan moderasi beragama Kementerian Agama RI perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui strategi penguatan moderasi beragama Kementerian Agama RI.

⁹ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): landasan teori, metodologi dan penerapan* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), v.

2. Untuk mengetahui kritik strategi penguatan moderasi beragama Kementerian Agama RI dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.

D. Kajian Terdahulu

Peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun perbedaan topik peneliti dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah penelitian, maka penulis lampirkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Judul	Publikasi	Hasil Penelitian
1.	Tim Pokja Moderasi Beragama Kemenag RI	Peta jalan (Road map) Penguatan moderasi beragama Tahun 2020-2024	Kementerian Agama RI	Strategi yang ditawarkan oleh kemenag dalam penguatan moderasi beragama adalah pertama, mengembangkan syiar agama yang damai dan maslahat. Kedua, menguatkan sistem pendidikan berbasis moderasi beragama. ketiga, mengelola rumah ibadat. Keempat, memanfaatkan

				<p>ruang publik untuk forum diskusi berbagai kalangan lintas agama maupun lintas suku bangsa. Kelima menguatkan peran pendidikan keagamaan seperti pesantren maupun pendidikan keagamaan lainnya.</p>
2.	Edi Junaedi	Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama	Jurnal Multikultural & Multireligius	<p>Dalam jurnal ini berisi tentang resensi buku moderasi beragama dikeluarkan oleh Kemenag. dalam Jurnal tersebut dijelaskan bahwa unsur fundamental dalam moderasi beragama haruslah berdasarkan keadilan dan keseimbangan. Dalam konsep moderasi beragama seorang yang beragama tidak boleh memiliki pemikiran yang terlalu</p>

				radikal atau liberal. Namun, seorang yang beragama harus menemukan titik temu dari kedua aliran ekstrim tersebut.
3.	Edi Junaedi	Moderasi Beragama Dalam Tinjauan Kritis Kebebasan Beragama	Jurnal Harmoni (Sinta 3)	Jurnal ini berisi tentang resensi dari buku “Moderasi Beragama Dalam Tinjauan Kritis Kebebasan Beragama” dalam jurnal tersebut berisi tentang poin-poin penting yang mengkritisi tentang buku moderasi beragama dan peta jalan penguatan moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kemenag.
4.	Yoce Aliah Darma	Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif	Refika Aditama	Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa teori AWK Norman Fairclough terdiri dari tiga dimensi. Dimensi <i>pertama</i> adalah tentang teks yang berupa

				<p>produksi dan dianalisis secara linguistik. Dimensi <i>Kedua</i>, praktik wacana memiliki bentuk berupa proses produksi, konsumsi dan interpretasi. Dimensi <i>ketiga</i> adalah praktik sosiokultural berhubungan meliputi berbagai praktik wacana yang terjadi di masyarakat yang berdampak secara langsung dan lebih luas. Praktik sosiokultural dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: situasional, institusional dan sosial.</p>
5.	Mohammad Asy'ari	Menyelami Makna Moderasi Beragama Di Indonesia:	Jurnal Ilmiah Spiritualis	Jurnal tersebut berisi tentang Kritik konsep moderasi beragama di Indonesia adalah fokus pendekatan yang dilakukan terlalu umum, karena hanya

		Kritik Dan Refleksi Atas Praktik Keberagamaan Kontemporer		berfokus pada agama sebagai sumber nilai moral dan tidak memperhitungkan faktor-faktor lain yang dapat mendukung moderasi beragama. Hal tersebut dapat mengakibatkan sudut pandang yang berbeda, dan dapat membatasi keterlibatan orang-orang dari berbagai latar belakang dalam upaya moderasi beragama. Seharusnya konsep moderasi beragama harus dipahami secara lebih komprehensif, dengan tetap memperhatikan aspek, politik, filsafat, ekonomi dan sosial.
6.	Hamdan	Wacana Dalam Perspektif Norman	Jurnal Komodifikasi	Menurut Norman Fairclough, Wacana memiliki tiga dampak dalam kehidupan sosial yaitu,

		Fairclough		<p>pertama; wacana dapat digunakan sebagai konstruksi identitas sosial dan dapat mengubah posisi sosial subjek. Kedua, wacana juga dapat mempererat relasi sosial seseorang atau kelompok dalam suatu ruang sosial, dan</p> <p>ketiga; wacana dapat digunakan untuk menyebarkan ideologi, kepercayaan dan pengetahuan</p>
7.	Elya Munfarida	<p>Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough</p>	Jurnal Komunika,	<p>Fairclough membagi wacana menjadi tiga dimensi, yaitu: teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Setiap dimensi ini mempunyai wilayah dan proses yang berbeda-beda, akan tetapi secara dialektis</p>

				<p>ketiganya saling berhubungan. Dimensi pertama adalah tentang teks yang berupa produksi. Selanjutnya, Dimensi Kedua, praktik wacana memiliki bentuk berupa proses produksi dan interpretasi. Serta memiliki keterkaitan antara teks dengan organisasi maupun lembaga tertentu. Setelah itu, Dimensi ketiga adalah konteks atau praktik sosial meliputi berbagai praktik sosio-kultural sesuai dengan proses produksi dan interpretasi itu berlangsung.</p>
8.	Mohamad Abdul Choliq	Aplikasi Analisis Wacana Kritis Norman	Skripsi yang diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel	Dalam menyikapi sebuah perbedaan Quraish Shihab menggunakan konsep “Wasathiyah”. Hal ini berarti dalam konsep

		Fairclough Dalam Buku “Wasatiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama ” Karya M. Quraish Shihab	Surabaya, Tahun 2022.	Wasathiyyahnya mengandung <i>common sense</i> (masuk akal). Setelah itu, beliau mulai menolak berbagai konsep <i>wasathiyah</i> yang tidak sejalan dengan Al-qur’an dan Hadits. Selanjutnya Quraish Shihab mulai mendamaikan perbedaan pendapat tentang konsep <i>wasathiyah</i> dengan cara memberikan pemahaman tentang konsep <i>wasathiyah</i> yang sesuai dengan ajaran Islam.
--	--	---	------------------------------	---

Setelah mempelajari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan oleh penulis sebelumnya dan sejauh pengetahuan penulis dapat diyakini bahwa penelitian dengan judul “Kritik Strategi Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Keberadaan peneliti dalam menggunakan berbagai jenis penelitian telah membuka berbagai kemungkinan yang ada. Pada jenis penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif, akan tetapi metode penelitian kualitatif ini tidak seperti biasanya yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berbasis *library research*. Hal pertama yang bisa dilakukan dalam penelitian yang berbasis *library research* adalah dengan cara melakukan observasi dengan mengumpulkan berbagai data yang relevan. Terkadang juga bisa digunakan pemeriksaan dokumen dinas pemerintah.¹⁰ Dalam penelitian kali ini yaitu dengan mengobservasi data berupa “Strategi penguatan moderasi Beragama Kementerian Agama” yang bisa didapat pada *website* resmi Kementerian Agama dalam buku “Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama 2020-2024”. Kemudian setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pemaparan tentang data apa saja yang sudah didapatkan dengan bentuk narasi. Langkah terakhirnya adalah dengan melakukan analisis yang sesuai dengan narasi tersebut. Dalam hal ini penulis menganalisis strategi penguatan moderasi Beragama Kementerian Agama dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough.

2. Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang wajib tersedia sebagai data saat menulis sebuah penelitian. Karena penulis melakukan penelitian kepustakaan disini, data biasanya tersedia dalam bentuk subjek penelitian atau buku dan artikel terkait. Jenis datanya adalah:

¹⁰ Nusa Putra, Penelitian Kualitatif IPS (Bandung: Remaja Rosdakarya), 93.

a) Sumber Primer

Dalam bab ini hasil data yang ditemukan ketika menggali informasi yang relevan dengan penelitian, terutama sebagai acuan dalam penelitian¹¹. Sumber data primer penelitian yang bersumber dari buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama berjudul: Peta Jalan (*Roadmap*) Kementerian Agama RI 2020-2024 dan Moderasi Beragama 2019. Selain itu untuk menganalisisnya menggunakan buku “Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif” karya Yoce Aliah Darma.

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang ditemukan secara tidak langsung dikarenakan untuk tambahan dalam pengumpulan penelitian. Sumber sekunder yang digunakan penulis adalah jurnal, buku, skripsi dan tesis.

3. Teknik Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mencari beberapa jurnal, buku, artikel dan *website* yang sekiranya relevan dengan topik penelitian yang kemudian dianalisis.

4. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif adalah metode penelitian dengan hasil lisan dan tertulis. Teknik analisis deskriptif adalah teknik yang

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

menggambarkan dan menganalisis data yang terkumpul sebagaimana adanya, dan tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan umum¹².

Tujuan materi dari tugas akhir ini adalah untuk mengkritik strategi penguatan moderasi beragama Kementerian Agama agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui secara komprehensif tujuan moderasi beragama sebenarnya dan untuk mendorong inklusivitas dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu penulis juga dapat mengurutkan data berdasarkan data sekunder atau primer dan memberikan sumber data yang dianggap relevan bagi penulis.

F. Kerangka Teori

Selanjutnya kasus radikalisme di Indonesia yang relatif sering terjadi pada beberapa tahun belakangan ini. Menurut Irjen Pol Ibnu Suhaendra, selaku Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan BNPT, menjelaskan bahwa kasus teror sejak tahun 2017-2022 kasus ancaman terorisme di Indonesia mengalami pergerakan yang fluktuatif. "Selama lima tahun terakhir, tren ancaman terorisme di Indonesia bergerak secara fluktuatif. Meningkat pada 2019, lalu menurun pada 2020, dan meningkat lagi pada 2022 berdasarkan Laporan GTI tahun 2022," jelasnya.¹³ Konflik tersebut dipicu akibat kurangnya perasaan tenggang rasa dan toleransi di antara mereka. Studi terkait hal ini telah dilakukan oleh sejumlah

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 21

¹³ Admin, "Laporkan Analisis Perkembangan Aksi Terorisme di Indonesia, BNPT Melalui Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Hadiri RDP Dengan Komisi III DPR RI", <https://www.bnpt.go.id/laporkan-analisis-perkembangan-aksi-terorisme-di-indonesia-bnpt-melalui-deputi-bidang-penindakan-dan-pembinaan-kemampuan-hadiri-rdp-dengan-komisi-iii-dpr-ri>, Diakses pada 15 Desember 2022.

institusi. Konflik agama, intoleransi, dan radikalisme merupakan masalah utama yang seharusnya bisa ditekan seminimal mungkin terjadi di Indonesia.

Kemudian Kementerian Agama dalam menanggapi hal tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Agama menjalankan arah kebijakan penguatan moderasi beragama di Indonesia menggunakan pendekatan sebagai berikut: (1) Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah, (2) Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, (3) Penyelarasan relasi agama dan budaya, (4) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan (5) Pengembangan ekonomi dan Sumber daya Keagamaan.¹⁴

Selanjutnya, kebijakan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough adalah adanya suatu objek kajian dari para penguasa baik dalam bentuk teks maupun bahasa yang diduga mengandung wacana atau ideologi tersembunyi di dalamnya. Norman Fairclough membagi wacana menjadi tiga dimensi, yaitu: (1) teks, (2) praktik wacana, (3) praktik sosiokultural. Setiap dimensi ini mempunyai wilayah dan proses yang berbeda-beda, akan tetapi secara dialektis ketiganya saling berhubungan.¹⁵

Pada dimensi *pertama* adalah tentang teks yang berupa produksi dan dianalisis secara linguistik. Dimensi *Kedua*, praktik wacana memiliki bentuk berupa proses produksi, konsumsi dan interpretasi. Serta memiliki keterkaitan antara teks dengan organisasi di masyarakat atau suatu lembaga tertentu. Dimensi *ketiga* adalah praktik sosiokultural yang berhubungan dengan konteks meliputi

¹⁴ RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, 49-58.

¹⁵ Elya Munfarida, "Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough" *Komunika : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 8, No. 1 (2014), 9.

berbagai praktik wacana yang sedang terjadi di masyarakat atau kebudayaan maupun kebijakan politik tertentu yang berdampak secara langsung dan lebih luas.¹⁶

Selanjutnya, ketiga dimensi ini harus diselidiki dengan menggunakan tiga model analitik yang berbeda. Deskripsi digunakan untuk analisis teks. Interpretasi digunakan untuk menganalisis produksi dan interpretasi teks. Kemudian, pada tingkat situasional, institusional, dan sosial dari praktik sosiokultural dianalisis dengan menggunakan pendekatan eksplanasi.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *Pertama*, penjelasan dari bab pertama berisi tentang paparan latar belakang dari suatu permasalahan yang perlu dikaji dan diteliti lebih dalam. Hal tersebut berawal dari keresahan yang sedang terjadi saat ini dan kemudian dirangkum dalam dua pokok rumusan masalah, serta tujuan dilaksanakan penelitian tersebut, kemudian tidak lupa dicantumkan juga kajian terdahulu dan jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Terakhir adalah sistematika pembahasan akan dibahas selanjutnya.

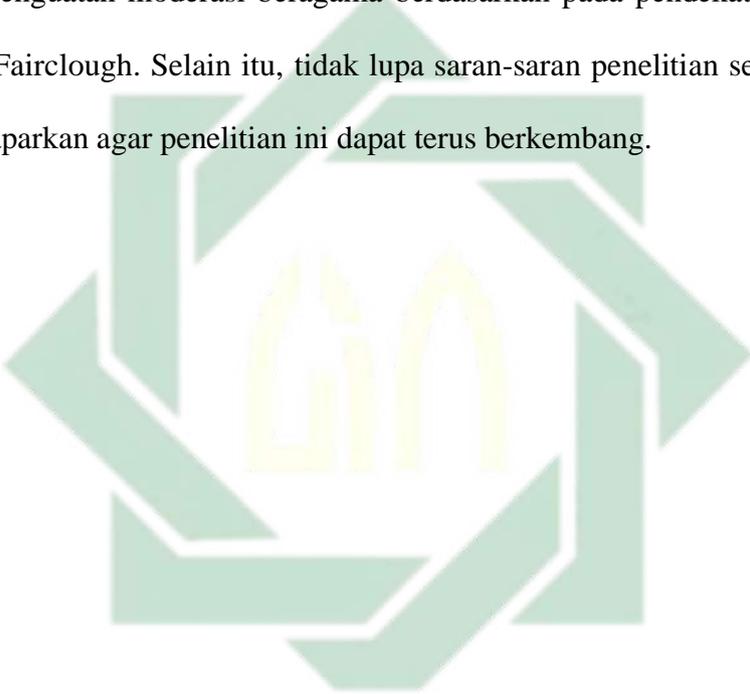
Bab *kedua*, penjelasan pada bab ini berisi paparan tentang landasan teori yang berkaitan Moderasi Beragama dan AWK

Bab *ketiga*, penjelasan pada bab ini berisi paparan dasar hukum moderasi beragama, implementasi program Kemenag dalam konteks moderasi beragama serta strategi penguatan moderasi beragama Kementerian Agama.

¹⁶ Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 127-128.

Bab *keempat*, penjelasan pada bab ini berisi tentang paparan analisis kritis program Kementerian Agama tentang strategi penguatan moderasi beragama berdasarkan pada pendekatan teori AWK Norman Fairclough.

Bab *kelima*, pada bab terakhir akan disimpulkan hasil dari kritik terhadap strategi penguatan moderasi beragama berdasarkan pada pendekatan teori AWK Norman Fairclough. Selain itu, tidak lupa saran-saran penelitian selanjutnya juga akan dipaparkan agar penelitian ini dapat terus berkembang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MODERASI BERAGAMA DAN ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH

A. Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi Beragama

Bicara tentang moderasi, sebenarnya kata tersebut berasal dari istilah latin yaitu *moderatio* yang bermakna keseimbangan. Selain itu, sebutan ini dapat juga diartikan sebagai perilaku penguasaan diri agar tidak melewati batas. Dalam KBBI kata moderasi memiliki makna yaitu penghindaran keekstreman. Jadi seseorang bisa dikatakan moderat, jika orang tersebut berperilaku wajar dan tidak keterlaluan.¹

Secara bahasa kata *moderation* dalam bahasa Inggris berarti sikap sedang dan tidak berlebihan dan memiliki padanan kata seperti *average* (rata-rata), *non-aligned* (tidak berpihak dan *standard* (baku). Selain itu, moderasi dikenal dalam bahasa Arab sebagai *wasath* atau *wasathiyah*, yang disamakan dengan *tawassuth* (tengah-tengah), *tawazun* (seimbang) dan *i'tidal* (adil). *Wasith* adalah individu yang menerapkan prinsip *wasathiyah*. Pada dasarnya dari semua kata yang sudah disebutkan mempunyai makna yang sama, yaitu "adil", karena kata tersebut bersifat netral dan tidak memihak.

Bahkan kata *wasith* telah diadopsi dalam bahasa Indonesia yang biasanya ditujukan kepada pemimpin atau penentu dalam pertandingan olahraga. Kata wasit dalam bahasa Indonesia berarti penengah atau juru damai jika terdapat suatu

¹ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 15.

perselisihan. Moderasi juga bisa diibaratkan sebagai seorang moderator dalam sebuah acara yang biasanya bertugas sebagai pemandu atau penengah dalam sebuah acara grup diskusi dan tidak berpihak kepada siapa pun.²

Definisi moderasi secara umum berarti berada di posisi tengah-tengah dan bersikap adil, baik dalam hal beragama, kehidupan bermasyarakat dan institusi negara dan orang yang dapat berperilaku tersebut disebut dengan moderat.

Sedangkan dalam pengertian yang lain disebutkan sikap moderat dalam Islam berarti tidak radikal maupun fundamentalis dan bersikap hanif (cenderung baik dan benar) dalam menerapkan ajaran agama Islam. Seperti halnya dalam konteks jihad di era sekarang dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk berkembangnya potensi yang ada dalam setiap manusia guna menjaga kerukunan antar umat beragama.³

Jadi dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah suatu konsep atau pendekatan yang bertujuan untuk mencapai kerukunan dan toleransi antar umat beragama yang berbeda-beda. Hal ini berarti harus ada sikap menghargai terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agamanya sendiri tanpa ada paksaan atau diskriminasi dari pihak mana pun.

Selanjutnya, moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya dialog dan komunikasi yang efektif antara pemeluk agama yang berbeda. Melalui dialog

² Ibid., 16.

³ Sri Yunanto, *Islam Moderat versus Islam Radikal: Dinamika Politik Islam kontemporer* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 47.

yang terbuka dan saling mendengarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan prasangka negatif antar umat beragama.

2. Batasan-batasan Moderasi Beragama

Seorang yang moderat juga memiliki batasan-batasan atau pantangan untuk dilanggar dalam menjalankan berbagai ritual keagamaannya yaitu: kemanusiaan, kesepakatan bersama dan ketertiban umum. Jadi dapat disimpulkan seorang yang moderat tidak hanya dituntut menjalankan berbagai ritual ibadah saja akan tetapi juga harus tetap memperhatikan aspek sosialnya juga dengan cara memastikan dalam menjalankan ritual ibadahnya tidak sampai melanggar tiga batasan tersebut.⁴

Terdapat dua prinsip utama yang harus dimiliki dalam menjalankan moderasi beragama yaitu keadilan dan keseimbangan. Bersikap adil berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Sedangkan keseimbangan berarti selalu berada di tengah-tengah kedua kubu yang saling bertentangan.⁵

Kemudian dalam menjalankan moderasi beragama dituntut untuk bersikap toleran. Karena bukan tidak mungkin seorang yang moderat tidak setuju dengan pandangan beragama orang lain. Maka dari itu sikap toleran dibutuhkan agar dapat menghargai dan menghormati berbagai perbedaan dalam beragama, akan tetapi bukan berarti orang yang moderat tidak memiliki pendirian yang kuat dalam beragama.

⁴ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab: Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang, 2019), 8.

⁵ Ibid., 8.

Mereka harus tetap teguh dengan pokok ajaran agama yang sifatnya tidak bisa diganggu gugat, akan tetapi mereka juga harus dapat memilah dan memilih salah satu dari berbagai pandangan tafsir atau hukum agama yang sering untuk diperdebatkan. Kemudian mereka tidak menyalahkan ajaran orang lain yang tidak sejalan dan tidak juga memaksakan ajaran tersebut kepada orang lain.⁶

3. Peran Lembaga Pemerintah dalam Mewujudkan Moderasi Beragama

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai lembaga yang saling menaungi satu sama lain dalam menjalankan suatu pemerintahannya agar dapat membantu negara Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa menjadi negara maju dan sejahtera. Dalam membentuk suatu lembaga negara diperlukan undang-undang untuk mengaturnya dan lembaga negara tersebut harus dibuat oleh negara dan dipergunakan sebagai alat kekuasaan untuk menjalankan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya.

Maka dari itu dibutuhkan kerja sama dari berbagai institusi lembaga negara lainnya agar tetap menjaga kredibilitasnya agar tidak terjadi kecemburuan sosial dalam masyarakat. Ketika semua institusi lembaga pemerintahan dari berbagai sektor saling bekerja sama dalam menjaga kebebasan beragama, dalam konteks ini disebut dengan moderasi beragama. Maka bukan tidak mungkin moderasi beragama di masyarakat Indonesia akan terwujud dengan ikatan yang

⁶ Abu Bakar, "Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama," *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2015), 123.

kuat. Berikut merupakan contoh lembaga pemerintahan yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia:⁷

- a. Lembaga Pemkot dan Pemprov Semua pegawai yang bekerja di lembaga pemkot maupun pemprov baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer memiliki tanggung jawab yang sama yaitu memberikan pelayanan dan hak beragama kepada semua lapisan masyarakat, sesuai dengan amanat konstitusi. Semua umat beragama dapat menggunakan semua fasilitas publik yang sudah disediakan Pemkot maupun Pemprov untuk dapat digunakan sebagai sarana dalam menjalankan ritual keagamaan.
- b. Lembaga Pendidikan, dalam dunia pendidikan diharapkan lembaga pendidikan dapat memberikan pelatihan kepada para pendidik tentang nilai-nilai moderasi beragama dan diharapkan ilmu tersebut dapat ditularkan kepada semua anak didiknya sehingga ketika mereka lulus dari sekolahnya masing-masing, mereka dapat berperilaku moderat di masyarakat.
- c. Lembaga TNI dan Polri, kedua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya TNI dan Polri dapat bekerja sama dalam menjaga kerukunan di masyarakat sesuai dengan hak konstitusional warga negara yang menjamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk menjalankan ritual keagamaannya masing-masing tanpa khawatir ada tekanan dari pihak lain.

⁷ Tim Pokja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 40-42.

d. Lembaga KPI, peran lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peranan yang penting di era sekarang ini. Salah satu peranan pentingnya dalam mewujudkan moderasi beragama adalah mengawasi dan memberikan arahan berbagai penyiaran TV yang ada di Indonesia agar menampilkan program siaran yang mengajarkan toleransi antar umat beragama dan melarang program TV yang mengajarkan ujaran kebencian kepada umat lainnya.

B. Analisis Wacana Kritis

1. Pengertian Analisis Wacana Kritis (AWK)

Definisi "wacana" rumit dan sangat besar. Sejak diperkenalkan ke sains modern dan interpretasi wacana yang sangat luas, istilah wacana telah dicatat dalam banyak penelitian sebelumnya sebagai sangat kabur. Alhasil, konsep wacana yang direfleksikan di sini akan lebih banyak dilihat dari perspektif linguistik, khususnya linguistik terapan. Di sini, ini berkaitan dengan pola bicara dan cara masyarakat tertentu menggunakan bahasa, dialek, dan klaim yang diterima.

Studi wacana berfokus pada percakapan antara individu yang memiliki kesamaan pola bicara. Wacana juga mengacu pada studi penggunaan bahasa dalam lingkungan sosial, khususnya pemeriksaan wacana lisan atau tertulis yang terjadi secara alami. Namun, sebagian besar peneliti setuju bahwa wacana mengacu pada linguistik penggunaan bahasa sebagai metode untuk memahami interaksi sosial, khususnya pemeriksaan ucapan atau tulisan yang terjadi secara alami. Sepanjang memenuhi kriteria wacana, suatu kata atau frasa dapat

dikatakan sebagai suatu wacana.⁸ Berikut merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu wacana:

- a. Topik adalah pernyataan singkat yang mencakup berbagai materi agar bermakna bagi pembaca dan pendengar.
- b. Topik yang diangkat, dalam mengungkapkan pokok bahasan Penulis atau pembicara melakukan gerak tubuh tertentu terkait tuturannya dalam menyampaikan informasi sebagai sarana berekspresi.
- c. Koherensi dan kohesi, koherensi menciptakan rekaman linguistik dari peristiwa komunikasi yang bermakna, sedangkan kohesi adalah kekompakan bagian-bagian sintaksis satu sama lain, termasuk konteks, dalam satu wacana.
- d. Goal (tujuan) Wacana memberikan informasi, emosional, berbasis sikap, persuasif, dan asosiatif semuanya dapat digunakan.
- e. Keteraturan, informasi yang disampaikan memiliki koherensi yang teratur dan logika yang teratur, masuk akal, baik dalam kata, frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf.
- f. Ko-Teks dan konteks, Konteks adalah situasi yang meliputi teks, serta pembicara, pendengar, waktu, topik, tempat, adegan, peristiwa, persyaratan, kode, dan situasi media. Penyelarasan, koordinasi, dan hubungan teks dengan teks lain adalah contoh dari ko-teks.

Sebuah sub bidang linguistik terapan yang dikenal sebagai analisis wacana meneliti wacana untuk mengidentifikasi pola komunikasi dan isu-isu lain yang tidak ditangani secara keseluruhan oleh tata bahasa. Beberapa mengklaim bahwa

⁸ Vidya Mandarani, *Buku Ajar Critical Discourse Analysis* (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), 2-3.

analisis wacana adalah bidang studi yang bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa yang sebenarnya digunakan dalam komunikasi.

Dalam hal ini, analisis wacana memberikan penekanan kuat pada pemeriksaan penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya ketika menyangkut penggunaan bahasa antara penutur di mana bahasa yang digunakan dapat diterima dan dipahami oleh penutur meskipun bahasa tersebut tidak dirumuskan menurut kaidah tata bahasa yang baku.

Menurut Renkema, ada tujuh syarat untuk menentukan satuan bahasa layak atau tidak sebagai wacana, antara lain:⁹

- a. Kohesi, yaitu hubungan yang tercipta ketika suatu unsur diinterpretasikan dalam kaitannya dengan unsur lain dalam teks. Dengan kata lain, ini menyangkut hubungan semantik antara potongan-potongan tekstual.
- b. Koheren, yaitu hubungan berdasarkan sumber luar selain teks. sesuatu yang menyinggung tentang keahlian dan pengalaman yang dimiliki penutur atau pembicara.
- c. Cerdas, yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan bahasa yang digunakan individu dalam berkomunikasi.
- d. Penerimaan, menggambarkan sekelompok kalimat yang dapat dipahami oleh lawan bicara dan dapat diterima untuk digunakan sebagai teks.
- e. Informasi, yaitu teks harus memasukkan informasi segar dan dapat dimengerti oleh pembaca.
- f. situasional, yaitu memperhatikan konteks latar dan saat teks dibuat

⁹ J. Renkema, *Introduction to discourse studies* (Amsterdam: John Benjamins Pub, 2004), 34.

g. Intelektualitas, yaitu hubungan antara suatu wacana dengan wacana lain yang dapat diterima secara luas.

Norman Fairclough dalam AWKnya telah membawa tradisi kritis analisis sosial ke dalam studi bahasa dan dapat berkontribusi pada analisis sosial kritis yang berfokus khusus pada wacana dan hubungan antara wacana dan elemen sosial lainnya (hubungan kekuasaan, ideologi, institusi, identitas sosial, dan lain sebagainya).

Fairclough juga menjelaskan bahwa AWKnya juga berfungsi sebagai kritik penjelas karena tidak hanya menggambarkan realitas yang ada tetapi berusaha menjelaskannya juga, misalnya dengan menunjukkan dampak dari struktur atau kebijakan atau kekuatan dari pemerintah bagi masyarakat sosial yang kemudian dipostulatkan oleh analisis yang selanjutnya realitas tersebut akan diuji coba.¹⁰

Menurut Van Dijk AWK adalah bidang interdisipliner yang mempelajari wacana, baik itu lisan atau tertulis. Dengan menganalisis teks secara hati-hati, para peneliti berharap dapat mengungkap ketidakadilan, agresi, dan aktivitas sosial yang tidak etis dengan melihat ke dalam dinamika kekuasaan dalam sebuah wacana yang digulirkan oleh pemerintah.¹¹

Tujuan mendasar dari analisis wacana kritis adalah untuk memeriksa penggunaan bahasa sebagai fenomena sosial dan untuk meneliti bagaimana bahasa memengaruhi kehidupan masyarakat untuk lebih memahami bagaimana

¹⁰ Norman Fairclough, "Critical Discourse Analysis", dalam *The Routledge Handbook Of Discourse Analysis*, ed. J. P. Gee (New York: Routledge, 2012), 9.

¹¹ Teun A. Van Dijk, "Principles of Critical Discourse Analysis," *Jurnal: Discourse & Society*, Vol. 4, No. 2 (April 1993), 250.

orang berkomunikasi dalam berbagai konteks untuk memajukan ideologi, tujuan, dan pesan mereka.

2. Perkembangan Analisis Wacana Kritis

Pada akhir tahun 1980-an, Norman Fairclough bersama dengan Ruth Wodak, Teun van Dijk, dan yang lainnya memimpin perkembangan konseptual dalam studi wacana di Eropa yang dikenal sebagai analisis wacana kritis (AWK). Mulai pada era sekarang AWK telah berkembang menjadi salah satu disiplin ilmu analisis wacana yang sedang populer.

AWK mengakui pentingnya bahasa dalam membangun relasi kuasa dalam masyarakat. Pada saat itu, penelitian linguistik di negara lain cenderung terkonsentrasi pada karakteristik formal bahasa, yang secara teori dapat dipisahkan dari contoh penggunaan bahasa tertentu dan mewakili kompetensi linguistik penutur. Kalimat dan komponen kalimat masih dipandang sebagai unit fundamental di mana hubungan antara bahasa dan situasi diperhitungkan, seperti dalam pragmatik, dengan fokus pada kompetensi pragmatis/sosiolinguistik penutur.

Dengan sedikit fokus pada pertanyaan hierarki sosial dan kekuasaan, sebagian besar penelitian sosiolinguistik yang dilakukan pada periode tersebut berfokus pada karakterisasi dan pemahaman keragaman bahasa, evolusi bahasa, dan mekanisme interaksi komunikatif. Produksi, persepsi, dan hubungan tulisan-

tulisan dengan dorongan-dorongan masyarakat dan institusi-institusi dalam latar semacam itu menunjukkan minat yang sama sekali berbeda.¹²

Deskripsi tentang dasar-dasar teoritis dan sumber-sumber bahasa kritis diberikan oleh Kress (1990). Dia mengklaim bahwa kelompok akademisi yang bekerja di University of East Anglia pada tahun 1980-an secara sadar mengadaptasi kata dari bahasa kritis sesuai dengan padanan sosial-filosofisnya. Pada tahun 1990-an, metode khusus analisis bahasa ini lebih sering digunakan dengan sebutan AWK.

Menurut Kress, AWK muncul sebagai teori bahasa yang berbeda dengan jenis bahasa kritis lainnya pada waktu itu. Dia memberikan daftar karakteristik karya yang menganut paradigma AWK dan menjelaskan perbedaan analisis wacana politik lainnya. Dalam karyanya, Kress mengartikulasikan banyak praduga dasar AWK yang penting pada awalnya dan kemudian mengembangkan teorinya.¹³

Praduga tersebut mencakup hal-hal seperti: bahasa adalah fenomena sosial; tidak hanya individu, tetapi juga institusi dan kelompok sosial, memiliki makna dan nilai khusus yang diungkapkan dalam bahasa secara sistematis; teks adalah satuan komunikasi bahasa yang relevan; pembaca/pendengar bukanlah penerima pasif dalam hubungannya dengan teks; dan seterusnya.

Untuk menentukan akar paling awal dari bahasa kritis, Fowler telah menunjukkan bagaimana metode yang ditawarkan oleh teori linguistik yang diterima, seperti teori tata bahasa fungsional sistemik Halliday (fungsi bahasa)

¹² Ruth Wodak dan Michael Meyer, *Methods of critical discourse analysis*, Introducing qualitative methods (London: Sage, 2001), 5.

¹³ *Ibid.*, 15.

dan tata bahasa Chomsky, dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur kekuasaan linguistik dalam teks. Fowler menunjukkan bagaimana strategi tata bahasa yang sistematis bekerja untuk membangun, memanipulasi, dan menaturalisasi hierarki sosial tidak hanya dalam wacana berita tetapi juga dalam kritik sastra.¹⁴

Seperti dalam karya bahasa kritis awal lainnya, Fairclough menjabarkan ide-ide sosial yang mendukung AWK dan menganalisis sejumlah sampel tekstual untuk menunjukkan tujuan lapangan dan teknik analitis. Belakangan, Fairclough, Chouliariki, dan lainnya telah menjelaskan dan mengelaborasi beberapa perkembangan dalam AWK, menunjukkan tidak hanya bagaimana kerangka analitis untuk memeriksa bahasa dalam hubungannya dengan kekuasaan dan ideologi dikembangkan, tetapi juga bagaimana AWK dibentuk membantu dalam mengungkap sifat wacana dari sebagian besar perubahan sosial dan budaya kontemporer.¹⁵

Bahasa sebagai media khususnya ditelaah sebagai lokasi kekuasaan, konflik, dan juga sebagai tempat di mana bahasa tampak transparan. Institusi media sering mengklaim tidak memihak karena menawarkan forum untuk percakapan publik, mencerminkan situasi politik dan sosial tanpa bias, dan menyajikan pendapat dan pembenaran dalam pembuatan berita.

C. Teori Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

1. Wacana Sebagai Praktik Sosial

¹⁴ Ibid., 16.

¹⁵ Norman Fairclough, *Language and Power: Relasi bahasa, Kekuasaan dan Ideologi*, terj. Indah Rohmani (Malang: Boyan Publishing, 2003), 2.

Hubungan bahasa sebagai wacana erat kaitannya dengan masyarakat. Karena bahasa merupakan bagian dari masyarakat dan bahasa juga dapat diatur sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Jadi bahasa dapat dikatakan sebagai fenomena sosial sekaligus fenomena linguistik.¹⁶

Persepsi bahasa sebagai fenomena sosial berarti bahasa merupakan produk dan proses hasil dari fenomena sosial. Perbedaan yang mencolok antara teks dengan wacana adalah teks yang merupakan produk bahasa sedangkan wacana berupa kondisi sosial masyarakat yang dituangkan dalam bentuk teks. Kondisi sosial merupakan tempat teks diproduksi dan diinterpretasi.¹⁷

Norman Fairclough menyatakan tentang adanya keterkaitan antara praktik sosial dengan bahasa atau teks (sebagai produk bahasa) dan kemudian dieksplorasi secara menyeluruh hubungan antara karakteristik sosial dan sifat teks bahasa tersebut. Hal tersebut bertujuan agar dapat dibuat lebih mudah dalam menggabungkan "mikro" (teks) dengan "makro" (konteks masyarakat). Selain itu dalam pendekatan "kritis", analisis wacana berarti berusaha untuk mengungkap praktik wacana dalam masyarakat melalui analisis kritis dengan menghubungkan teks, kondisi sosial, ideologi dan kekuasaan.¹⁸

B. Metode Analisis Wacana Tiga Dimensi

Wacana telah tertanam secara langsung dalam praktik sosiokultural pada sejumlah tingkatan masyarakat maupun pada lembaga atau organisasi yang lebih luas. Analisis wacana menggunakan pendekatan yang melibatkan deskripsi

¹⁶ Diah Kristina, dkk., *Analisis wacana kritis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 41.

¹⁷ Ibid., 44.

¹⁸ Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, Cetakan Kedua, (London: Routledge, 2013), 131.

linguistik teks bahasa, interpretasi hubungan antara proses wacana (produktif dan interpretatif) dan teks.¹⁹

Norman Fairclough membagi wacana menjadi tiga dimensi, yaitu: (1) teks, (2) praktik wacana, (3) praktik sosiokultural. Setiap dimensi ini mempunyai wilayah dan proses yang berbeda-beda, akan tetapi secara dialektis ketiganya saling berhubungan. Berikut tiga dimensi AWK Norman Fairclough:²⁰

Pada dimensi *pertama* adalah tentang teks yang sudah diproduksi dan dianalisis secara linguistik. Pada dimensi ini juga melibatkan analisis fitur linguistik teks, seperti pilihan kata, sintaksis, metafora, dan strategi retorik. Ini berfokus pada bagaimana pilihan linguistik ini mencerminkan dan memperkuat hubungan kekuasaan dan posisi ideologis. Analisis tekstual berusaha mengungkap makna tersembunyi, bias implisit, dan strategi diskursif yang digunakan untuk melegitimasi atau menantang wacana yang dominan.²¹

Dimensi *Kedua*, praktik wacana memiliki bentuk berupa proses produksi, konsumsi dan interpretasi dari sebuah wacana, serta memiliki keterkaitan antara teks dengan organisasi di masyarakat atau suatu lembaga tertentu. Praktik wacana ini tidak hanya mencakup produksi teks tetapi juga cara teks didedahkan, ditafsirkan, dan ditanggapi oleh berbagai kalangan yang membacanya. Dimensi ini menyoroiti dinamika kekuasaan yang terlibat dalam produksi wacana dan negosiasi makna.²²

¹⁹ Ibid., 133.

²⁰ Kristina, dkk., *Analisis wacana kritis*, 8.

²¹ Ibid.

²² Ibid., 9.

Dimensi *ketiga* adalah praktik sosiokultural yang berhubungan dengan konteks meliputi berbagai praktik wacana yang sedang terjadi di masyarakat atau kebudayaan tertentu yang memiliki dampak lebih luas. Kemudian pada dimensi ini juga mengeksplorasi bagaimana struktur sosial, kondisi sejarah, ideologi, dan hubungan kekuasaan membentuk dan dibentuk oleh wacana. Analisis sosiokultural menyelidiki kesenjangan sosial, ideologi dominan, norma budaya, dan kekuatan politik-ekonomi yang memengaruhi penggunaan bahasa dan berkontribusi pada reproduksi atau transformasi kekuasaan.²³

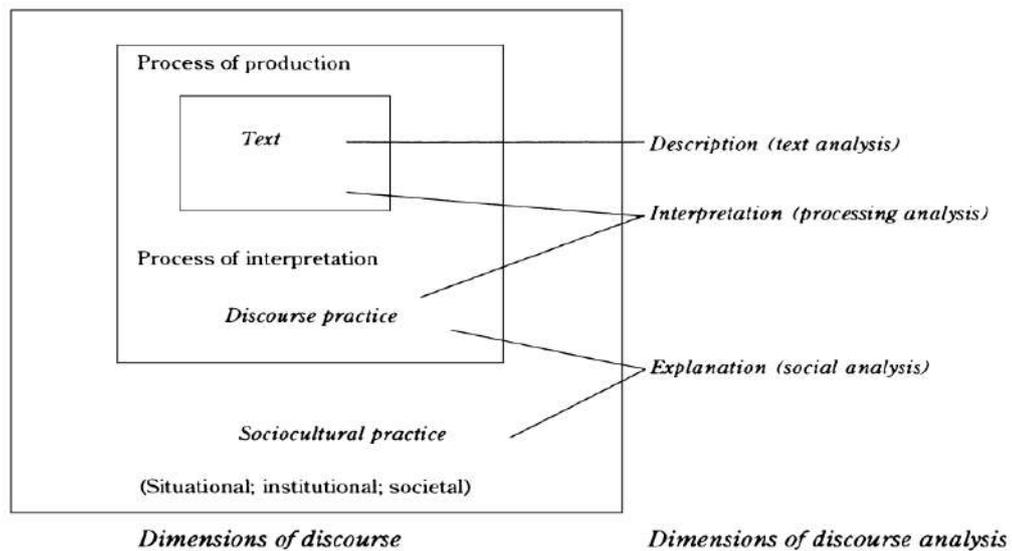
Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi ini, Fairclough memberikan kerangka komprehensif untuk menganalisis hubungan kompleks antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Ini menawarkan wawasan tentang bagaimana wacana berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, perlawanan, dan perubahan sosial, dan memungkinkan pemeriksaan kritis dan kritik terhadap wacana yang berlaku dan struktur kekuasaan yang mendasarinya.

Selanjutnya, ketiga dimensi ini harus diselidiki dengan menggunakan tiga model analisis yang berbeda dan kemudian dihubungkan. *Pertama*, deskripsi digunakan untuk analisis teks secara formal. *Kedua*, interpretasi digunakan untuk menganalisis hubungan antara teks dengan teks sebagai produk wacana. *Ketiga*, eksplanasi, digunakan pada tingkat situasional, institusional, dan sosial dari praktik sosial itu sendiri dan bagaimana dampak dari adanya wacana tersebut terhadap kehidupan sosial.²⁴

²³ Ibid., 10.

²⁴ Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 131.

Selain itu juga dalam eksplanasi berhubungan dengan proses pembuatan wacana dan proses sosial. Hal yang unik dari pendekatan ini adalah bahwa praktik wacana berfungsi sebagai mediator antara praktik sosiokultural dengan teks; bagaimana sebuah teks diproduksi atau diinterpretasikan, dalam arti praktik dan konvensi wacana apa yang diambil, dari tatanan wacana apa dan bagaimana mereka diartikulasikan bersama, bergantung pada sifat praktik sosiokultural yang dimiliki wacana tersebut (termasuk hubungan praktik dengan hegemoni yang ada) dan hakikat praktik wacana.²⁵



Gambar 2. 1: Dimensi Wacana

²⁵ Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, 132.

BAB III
STRATEGI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN
AGAMA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang dasar moderasi beragama, arah kebijakan dan strategi yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia ini.

A. Dasar Hukum dalam Moderasi Beragama

Dasar hukum penegakan moderasi beragama sudah mempunyai landasan hukum yang kuat di Indonesia. Sehingga konsekuensinya bagi negara adalah negara wajib melindungi semua warga negaranya yang ingin memilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Salah satu yang menjadi landasannya adalah tercantum pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.”

Kemudian dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) salah satunya mengatur tentang hak atas kebebasan pribadi yang ada pada pasal 20-27. Maka semua orang berhak atas kebebasan dirinya sendiri dalam menentukan berbagai pilihan hidupnya seperti: memilih agama, memilih partai politik, menyampaikan pendapat, hak mendapatkan dan mengganti kewarganegaraan dan lain sebagainya.

Salah satu penjelasannya terdapat pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Negara menjamin

kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan”. Karena agama telah melekat dalam diri manusia terutama bagi bangsa Indonesia itu sendiri yang tidak bisa lepas dari agama. Konsekuensinya adalah negara wajib melindungi semua warganya dalam memilih dan menjalankan ajaran agamanya.

Sebenarnya tanggung jawab negara dalam melindungi kebebasan beragama rakyatnya terletak secara khusus pada Kemenag yang bertugas mengatur dan menjalankan pemerintahan negara di bidang agama. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama pasal 2 yang berbunyi, “Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Jika berdasarkan Perpres tersebut dapat dipastikan bahwa Kemenag bertugas membantu pemerintah dalam mengurus agama. Namun, dikarenakan tugas melindungi hak kebebasan beragama termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia, maka lembaga atau kementerian lainnya juga harus ikut berpartisipasi menjalankan tugas tersebut.¹

Terakhir, pada Perpres No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN-PE) yang mengarah pada Terorisme adalah kebijakan lain yang sangat penting. Namun, meski tidak ada hubungan secara langsung dengan moderasi beragama, masyarakat percaya bahwa salah satu tujuan dari rencana aksi tersebut adalah untuk memastikan bahwa masyarakat tidak menggunakan kekerasan, apalagi sampai menyebabkan aksi teror terhadap

¹Tim Pokja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 4.

masyarakat. Sebenarnya terdapat tujuan yang mirip dengan tujuan dari moderasi beragama.²

Tujuan utama dari dibentuknya Perpres No. 7 tahun 2021 tentang No. 7 tahun 2021 tentang RAN-PE adalah “(1) pencegahan dan penanggulangan; (2) penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan undang-undang nasional; dan (3) kolaborasi dan kerja sama internasional”. Dalam menjalankan aksinya secara umum RAN-PE lebih mengedepankan sisi humanis dan tetap berpegang teguh terhadap HAM. Sehingga diharapkan aksi ini dapat berhasil dalam mengurangi isu radikalisme di Indonesia.³

B. Strategi Penguatan Moderasi Beragama

Mewujudkan moderasi beragama agar tercipta kerukunan dalam umat beragama dibutuhkan kerja sama antara penguasa dan masyarakat. Hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan moderasi beragama adalah dengan membangun rumah peribadatan yang masih belum ada dalam suatu wilayah. Kemudian yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam membangun moderasi beragama adalah dengan cara membangun kelompok sosial atau organisasi masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dengan tetap menghargai ajaran agama lain.⁴

Penentuan arah kebijakan dan strategi yang digunakan oleh Kemenag dalam mewujudkan visi dan misinya, berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka

² Agus Muhammad dan Sigit Muryono, *Jalan Menuju Moderasi Modul Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru* (Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2021) 11.

³ Ibid.

⁴ Muhammad Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Agama Menghadapi Gelombang Radikalisme* (Jakarta: Gramedia, 2020), 268.

Menengah (RPJMN) 2020-2024. Pada salah satu bagian dari RPJMN 2020-2024 tertuang isu penting tentang arah kebijakan negara Indonesia dalam pembangunan karakter masyarakat Indonesia yang rukun dan damai, akan tetapi tetap berpegang teguh pada esensi ajaran agamanya masing-masing. Oleh karena itu moderasi beragama menjadi topik penting dalam menyukseskan salah satu program prioritas nasional tentang sumber daya manusia.⁵

Tujuan dari pembuatan kebijakan ini adalah agar masyarakat Indonesia dapat berperilaku moderat dengan saling menghargai orang-orang yang agamanya berbeda. Kemudian tujuan selanjutnya adalah penegasan kembali bahwa Indonesia bukanlah negara yang menganut ajaran sekuler dengan memisahkan antara agama dengan negara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak dapat berpisah dengan ajaran agama. Maka dari itu, negara hadir dengan cara membantu warganya dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Posisi yang digunakan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Kemenag adalah dengan cara berada di posisi “*in between*” yang berarti pemerintah berada di posisi antara tidak boleh terlalu turut andil dengan urusan agama, namun juga tidak boleh terlalu jauh dalam mengurus agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa posisi negara dalam mengurus agama berada pada posisi hanya sebatas berorientasi dalam nilai-nilai agama yang paling dasar yaitu membuat semua pemeluk agama dapat merasa nyaman, tenang dan damai dalam menjalankan ibadahnya.⁶

⁵ Tim Kementerian Agama RI, *Rencana Strategi Kementerian Agama 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 81.

⁶ RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, 49.

Berikut merupakan lima strategi yang digunakan Kemenag dalam menjalankan arah kebijakan penguatan moderasi beragama di Indonesia, yaitu:⁷

1. Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah, strategi program yang akan dijalankan oleh Kemenag adalah:

- a. Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
- b. Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.
- c. Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat
- d. Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru.
- e. Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan

2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, strategi program yang akan dijalankan oleh Kemenag adalah:

- a. Perlindungan umat beragama untuk menjamin hak sipil dan hak beragama.

⁷ Ibid., 49-58.

- b. Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.
- 3.** Penyelarasan relasi agama dan budaya, strategi program yang akan dijalankan oleh Kemenag adalah:
- a. Penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama.
 - b. Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama.
 - c. Pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
- 4.** Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, strategi program yang akan dijalankan oleh Kemenag adalah:
- a. Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan.
 - b. Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga.
 - c. Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal.
 - d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.
- 5.** Pengembangan ekonomi dan Sumber daya Keagamaan, strategi program yang akan dijalankan oleh Kemenag adalah:
- a. Pengelolaan dan pemberdayaan dana sosial keagamaan perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip adil dan berimbang.
 - b. Pengembangan kelembagaan ekonomi umat.
 - c. Pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.

C. Implementasi Program Kemenag dalam Moderasi beragama

Berdasarkan hasil survei yang diumumkan oleh Ahmad Nurwakhid selaku Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengumumkan bahwa, Indeks radikalisme di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2019 sebanyak 38,4 % masyarakat Indonesia terpapar radikalisme dan sampai tahun 2021 mengalami penurunan di angka 12,2 %. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada 33 juta masyarakat yang masih terpapar radikalisme.⁸

Menurut Nurwakhid, indikasi seseorang yang berpotensi terpapar radikalisme adalah orang-orang yang anti Pancasila, Intoleran terhadap perbedaan, anti pemerintah dengan menyebarkan berita hoaks dan tidak ragu menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham.⁹

Sebagai bentuk kepedulian negara terhadap semua rakyatnya yang memiliki beragam budaya, agama dan ideologi yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia dituntut komitmennya secara konkret untuk mengentaskan masalah-masalah yang menyangkut keamanan dan kenyamanan setiap warga negaranya.

Maka dari itu Kemenag yang menjadi sektor terdepan dalam menjaga kerukunan semua umat beragama di Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ketertiban sosial dan mengurangi perpecahan dalam masyarakat terutama yang disebabkan oleh agama. Salah satu cara yang dilakukan

⁸ Rofi Ali Majid, "BNPT: 33 Juta Penduduk Indonesia Terpapar Radikalisme Butuh Undang-Undang Pencegahan", <https://www.kompas.tv/nasional/311315/bnpt-33-juta-penduduk-indonesia-terpapar-radikalisme-butuh-undang-undang-pencegahan>. Diakses pada 11 Juni 2023.

⁹ Ibid.,

oleh Kemenag dalam mengentaskan berbagai masalah tentang HAM dan ketertiban umum yang disebabkan oleh agama adalah dengan melakukan edukasi tentang moderasi beragama. Berikut merupakan program yang telah dijalankan oleh Kemenag:

1. Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan

Implementasi moderasi beragama pada bidang pendidikan akan bertumpu pada seorang tenaga pendidik. Kemudian tenaga pendidik tersebut dituntut agar bisa memberikan sebuah contoh penerapan moderasi beragama secara nyata dan dapat mengajarkan langsung kepada semua peserta didiknya. Dengan cara tersebut diharapkan semua peserta didiknya dapat memahami dan mempraktikkan nilai-nilai moderasi agama dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan berikut merupakan strategi yang akan dilakukan dalam implementasi moderasi beragama pada bidang pendidikan:

1. Penyisipan (insersi) dengan cara mengajarkan secara tidak langsung nilai-nilai atau ajaran yang berkaitan dengan moderasi di tempat dan kondisi yang tepat. Karena pada mata pelajaran atau mata kuliah tertentu sudah mengandung muatan yang mengandung moderasi beragama. Konsep inti moderasi sudah tertanam pada kurikulum pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemenag, terlepas dari tingkat atau jenis pengajaran yang diberikan. Sementara implementasinya lebih menekankan pada aspek bagaimana

substansi terkait dengan semangat moderasi beragama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

2. Mengoptimalkan strategi pembelajaran yang berpotensi memunculkan pemikiran kritis, menghargai perbedaan, toleransi, menerima sudut pandang orang lain, demokrasi, sportif, tanggung jawab dan berani mengemukakan gagasan. Saat mentransfer ilmu kepada murid, baik di dalam maupun di luar kelas, menggunakan metode berdasarkan yang nilai-nilai moderasi beragama secara moderat. Misalnya, memanfaatkan strategi diskusi atau argumentasi (debat aktif) untuk menumbuhkan cara berpikir yang kritis, sportif, menghargai sudut pandang orang lain, dan berani mengemukakan pendapat secara wajar. Menggunakan konsep “setiap orang adalah guru” untuk mendorong pola pikir keberanian dan tanggung jawab atas pemikiran yang disuarakan; memanfaatkan metode pembelajaran *jigsaw* untuk mengembangkan sifat amanah, sportif, tanggung jawab dan seterusnya merupakan beberapa contoh yang bisa diterapkan dalam pembelajaran moderasi beragama.¹¹

3. Menyusun berbagai rangkaian agenda program pendidikan, pelatihan, dan sesi pembekalan dengan topik moderasi beragama sebagai fokus utama.

Dimungkinkan juga untuk mencapai ini dengan menyelenggarakan kelas khusus atau menerbitkan materi yang berpusat pada moderasi beragama.

Namun, opsi yang terakhir ini tidak disarankan kecuali memang sangat perlu dilaksanakan karena akan dapat menambah jumlah pekerjaan yang

¹⁰ Aceng Abdul Aziz, dkk., *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019) 151.

¹¹ Ibid.

harus dilakukan siswa atau mahasiswa untuk belajar, dan diperkirakan hal ini akan menambah jumlah waktu yang diperlukan bagi mereka untuk menyelesaikan studinya. Mengingat pertimbangan-pertimbangan ini, moderasi beragama seharusnya tidak diperlakukan sebagai topik yang berbeda, melainkan sebagai elemen yang mendasar bagi semuanya. Sebagian dari konten yang diasosiasikan dengan moderasi beragama sebenarnya adalah tujuan terselubung, atau yang diajarkan secara bertahap kepada siswa tanpa harus menggunakan kata "moderasi beragama".¹²

4. Mengadakan evaluasi kepada tenaga pendidik melakukan observasi secara serentak untuk mengevaluasi ketercapaian proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan kegiatan yang berpotensi membangun sikap moderat. Beberapa contoh dari pendekatan ini adalah dialog aktif dan menanggapi kata-kata dan tindakan mereka. Dengan bantuan tahapan-tahapan ini, guru akan dapat menentukan sejauh mana siswa memahami dan mempraktikkan moderasi beragama. Jika ditemukan cikal-bakal dari ideologi radikalisme di kemudian hari, maka para tenaga pendidik dapat menindaklanjuti dengan membantu siswa menginternalisasi cita-cita moderasi ini melalui langkah-langkah selanjutnya.¹³

Berikut akan dipaparkan gambar tentang agenda program yang sudah dilaksanakan oleh Kemenag dalam bidang pendidikan:

¹² Ibid., 152.

¹³ Ibid.

UHN – UIN Sunan Kalijaga Jalin Sinergi Penguatan Moderasi Beragama

M. Arif Efendi
Kontributor

Selasa, 17 Januari 2023, 20:04 WIB



Foto bersama civitas UHN dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta usai melaksanakan kerjasama

Gambar 3. 2: Seminar Moderasi Beragama yang diadakan tiga PTKN

Pada hari Senin 16 Januari 2022, UHN I Gusti Bagus Sugriwa telah mengadakan kerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga dalam rangka penguatan moderasi beragama. I Gusti Ngurah Suidiana selaku rektor UHN IGB Sugriwa berharap bahwa “hasil dari kerja sama tersebut dapat menghasilkan berbagai penelitian dengan tema moderasi beragama dan dapat melakukan pertukaran mahasiswa dalam kegiatan KKN Nusantara”.¹⁴

Guru PAI Ikuti Seminar Moderasi Beragama di UIAD

SENIN, 13 FEBRUARI 2023 6:27 PM
By zainal abidin
Posted on 13 Februari 2023



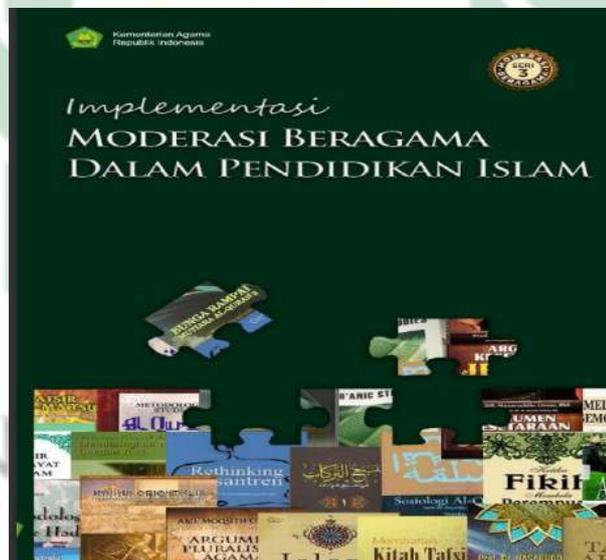
Kepala Kantor Kewasag Srija, 14 Januari menjadi Narasumber pada Seminar Moderasi Beragama di UIAD Srija. (doi/pangki)

Gambar 3. 3: Seminar Moderasi Beragama Bersama Guru PAI di UIAD.

¹⁴ M. Arif Efendi, “UHN-UIN Sunan Kalijaga Jalin Sinergi Penguatan Moderasi Beragama”, <https://kemenag.go.id/daerah/uhn-uin-sunan-kalijaga-jalin-sinergi-penguatan-moderasi-beragama-opa9x6>, diakses pada 17 Juni 2022.

Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) mengadakan seminar moderasi beragama dengan narasumber H. Jamaris, selaku kepala Kemenag kabupaten Sinjai dan Dr. Suriati, M.Sos.I. Seminar tersebut diadakan di Auditorium H.M. Amir Said pada hari Selasa 13 Februari 2023 pagi. Seminar tersebut diadakan oleh HIMAPRODI PAI Fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan UIAD Sinjai. Acara seminar tersebut dihadiri oleh Guru-guru PAI dan Mahasiswa UIAD.¹⁵

Berikut merupakan berbagai produk buku-buku yang dibuat oleh Kementerian Agama dalam menyukseskan moderasi beragama dalam bidang Pendidikan:



Gambar 3. 4: *E-Book* Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam

Agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Pada bulan Desember 2021 jumlah persentase penduduk muslim di Indonesia sebanyak 86,93% dari jumlah total penduduk Indonesia berjumlah sekitar 273, 87 juta

¹⁵ Zainal Abidin, "Guru PAI Ikuti Seminar Moderasi Beragama di UIAD", <https://Sinjai.Info/Guru-Pai-Ikuti-Seminar-Moderasi-Beragama-Di-Uiad/>, Di akses pada 17 Juni 2023.

jiwa. Jadi total penduduk muslim Indonesia berjumlah sekitar 238,09 juta jiwa.¹⁶ Dikarenakan jumlah umat muslim yang begitu besar maka perlu adanya tindakan preventif dalam mengurangi kesalahpahaman antar agama dari pengaruh radikal, intoleran dan ekstrem.

Salah satu metode pendekatan yang dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah melalui sektor pendidikan Islam sangat penting dalam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan. Pendidikan Islam masih harus berhadapan dengan berbagai penciptaan pemahaman keagamaan yang sentimental dan melakukan edukasi kepada kelompok masyarakat yang cenderung kurang memahami realitas perbedaan dan memiliki pemahaman keagamaan yang sempit, agar dapat menerima keragaman dan perbedaan.¹⁷



Gambar 3. 5: E-Book Jalan Menuju Moderasi (Modul Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru)

¹⁶ Viva Budy Kusnandar, "Persentase Pemeluk Agama di Indonesia (31/12/31)", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>, diakses pada 17 Juni 2023.

¹⁷ Aziz, dkk., *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, 1.

Menurut buku jalan menuju moderasi, sebelum mengajarkan moderasi beragama kepada muridnya, hendaknya seorang guru tersebut harus dapat bersikap moderat terlebih dahulu dengan meluruskan cara pandangya dan perilakunya harus sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama. karena guru merupakan seorang *role model* (teladan) bagi murid-muridnya.¹⁸

Selanjutnya, Kemenag juga tidak lupa memberikan panduan tentang teknik pelaksanaan kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan, target capaian yang harus dicapai dan lain-lain. Semua telah dijelaskan secara detail dalam buku tersebut.¹⁹



Gambar 3. 6: E-Book 9 Aktivitas Hebat Pelajar Moderat

Kemenag telah mengeluarkan buku “9 Aktifitas Hebat Pelajar Moderat”. Buku tersebut berisi tentang panduan dalam menyelenggarakan moderasi beragama di sekolah. Buku ini ditujukan kepada para siswa khususnya pada generasi Z saat ini.

¹⁸ Muryono, *Jalan Menuju Moderasi Modul Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru*, 21.

¹⁹ Ibid.

Dikarenakan buku ini ditujukan kepada siswa maka buku ini dibuat ringkas dan semenarik mungkin, agar pesan-pesan inti dari moderasi beragama dapat tersampaikan kepada siswa-siswi. Hal yang paling unik dan menarik dari buku tersebut adalah dalam memaparkan nilai-nilai moderasi beragama disertai dengan gambar kartun/komik. Buku ini juga sering digunakan di sekolah-sekolah dan telah mendapatkan *feedback* positif bagi pembacanya.²⁰

2. Implementasi Moderasi Beragama di Media Informasi

Kemajuan teknologi informasi saat ini cukup tinggi. Hal ini dapat diamati pada struktur dan pola komunikasi manusia yang ada saat ini. Sekalipun tidak ada komunikasi tatap muka pada masa sekarang, manusia relatif mudah untuk berkomunikasi. Hal ini berbanding terbalik dengan betapa sulitnya komunikasi di masa lalu. Kenyamanan komunikasi kita saat ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin rumit dan penemuan teknologi informasi dan komunikasi baru.²¹

Media sosial sebagai salah satu produk kemajuan teknologi Informasi telah dianggap sebagai kebutuhan vital bagi manusia modern saat ini untuk memiliki akses dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan adalah semua orang dapat menerima akses informasi tentang masyarakat, budaya, pendidikan, Agama, dan topik lainnya melalui berbagai media sesuai yang diinginkan. Kemudian dari konten media tersebut dapat

²⁰ Siti Kholisoh dan Irfan Amalee, *9 Aktivitas Hebat Pelajar Moderat* (Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021), 5.

²¹ Ahmad Zaini dan Dwy Rahmawati, "Efektivitas Dakwah Melalui Media Sosial Di Era Media Baru," *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 8, No. 1 (Juni, 2021): 163.

memotivasi masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi konten yang sedang diminati.

Isu ideologi radikalisme yang disebarakan lewat media sosial membuat masyarakat awam lebih mudah terpengaruh. Hal ini lantaran media sosial dapat menjadi sarana wadah dalam menampung berbagai masuknya informasi atau ideologi di luar sana dengan berbagai kepentingan pribadi mereka. Tentu akibat dari wacana tersebut dapat mengancam ideologi sikap moderat yang dianggap dapat memberikan kedamaian dibandingkan dengan ideologi yang bersifat radikal.²²

Maka dari itu Kemenag berusaha untuk memberikan edukasi tentang moderasi beragama melalui berbagai media sosial resmi Kemenag, dengan cara membuat berbagai konten setiap harinya baik di Instagram, Facebook, Youtube, website resmi Kemenag dan bahkan sekarang Kemenag telah membuat aplikasi resmi yang ditujukan untuk membantu berbagai informasi dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berikut akan disajikan gambar implementasi program yang sudah dilakukan oleh Kemenag dalam menyebarkan moderasi beragama di media sosial:

²² Robeet Thadi, "Kampanye Moderasi Beragama di Ruang Digital Indonesia," *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 11, No. 2 (Desember, 2022), 172.



Gambar 3. 7: Penyebaran Nilai-nilai Moderasi Beragama di Instagram

Dalam menyebarkan ajaran moderasi beragama, Kemenag tidak lupa dalam menyebarkannya lewat media sosial miliknya. Kemudian Kemenag telah memposting ajaran moderasi beragama yang bertujuan untuk terus membangun kerukunan antar umat beragama dan mengingatkan kita agar tetap bersatu. Postingan tersebut dapat dilihat pada akun instagram “kemenag_ri” pada tanggal 14 Januari 2023. Dalam postingan tersebut nampak kemenag mengutip pernyataan dari salah satu pegiat media sosial yang terkenal akan kemoderatannya, yaitu: Husein Jakfar Al Haddar atau yang sering dikenal dengan “Habib Jakfar”.



Gambar 3. 8: Aplikasi Pusaka

Dalam aplikasi pusaka yang dibuat oleh Kemenag bertujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat terutama dalam hal keagamaan. Aplikasi tersebut selain berisi tentang layanan-layanan haji, pendaftaran nikah dan sertifikasi halal, terdapat juga tentang bacaan doa dan kitab suci dari berbagai agama resmi di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa Kemenag berusaha memberikan pelayanan yang sama kepada masing-masing agama di Indonesia.



Gambar 3. 9: FGD Uji Publik Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama

Pada akun Youtube Kemenag yang bernama “Puslitbang Kemenag Channel” Kemenag telah melakukan *live streaming* akun youtubanya tersebut. *Live streaming* tersebut menyiarkan tentang FGD peta jalan moderasi beragama bersama para *stakeholder* yang sudah ahli dalam bidangnya dan perwakilan dari masing-masing pemuka agama pada tanggal 6 Oktober 2021. Tujuan dari *live streaming* tersebut adalah untuk memastikan rencana program moderasi beragama yang dibuat oleh Kemenag dapat berjalan dengan baik di Masyarakat dengan cara mengujinya bersama para *stakeholder* dan para pemuka agama lainnya.²³

²³ Puslitbang Kemenag Channel, “FGD Uji Publik Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama”, <https://www.youtube.com/watch?v=IaAJvIt27aM&t=7830s>, diakses pada 17 Juni 2023.



Gambar 3. 10: Video animasi tentang Moderasi Beragama

Pada gambar 3. 11, Kemenag juga membuat program penyiaran moderasi beragama dalam akun youtubnya dalam bentuk animasi juga di tanggal 28 Februari 2022. Dalam video animasi tersebut dijelaskan konsep moderasi beragama yang sederhana agar lebih mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Video animasi tersebut juga menjelaskan istilah moderasi beragama dari berbagai agama di Indonesia.

D. Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama

Salah satu wujud dari program penguatan moderasi Beragama yang diemban oleh Kemenag adalah membuat peta jalan penguatan moderasi beragama. Tujuan penguatan moderasi beragama ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar semua masyarakat Indonesia dapat hidup dengan damai dan dapat menghargai perbedaan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Sering kali dalam beragama terjadi multitafsir. Dampak dari adanya multitafsir tersebut bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan di masyarakat. Karena jika terdapat suatu tafsir ekstrem dan kemudian dipercaya oleh banyak orang, maka tentu hal tersebut berpotensi besar mengganggu ketertiban umum.

Tujuan dibuatnya peta jalan penguatan moderasi beragama adalah agar Kemenag dalam menjalankan aksinya dapat mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui, strategi apa yang digunakan dan target apa saja yang harus dicapai, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan mengetahui tingkat kesuksesan program tersebut dengan parameter yang jelas.

Penyusunan peta jalan ini dibuat setelah melalui proses diskusi yang sangat panjang dengan para *stakeholder* yang ahli dengan bidangnya masing-masing. Dengan tetap melibatkan masyarakat sipil moderat dan dari pihak lembaga atau kementerian terkait. Peta jalan penguatan moderasi beragama ini tidak mungkin bisa berjalan dengan baik, tanpa adanya kontribusi langsung dari Pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri yang ingin menciptakan perdamaian antar umat beragama di tanah air Indonesia.²⁴

1. Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama

Roadmap ini dibuat Kemenag sebagai buku panduan dalam melaksanakan penguatan Moderasi Beragama tahun 2020-2024. Berikut merupakan tahapan yang harus dicapai Kemenag dalam setiap tahunnya.²⁵

a. Tahun 2021: Penguatan perspektif moderasi beragama dalam institusi. Tahap ini ditempuh melalui beberapa agenda sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kerangka kerja tingkat direktorat.
- 2) Penyiapan instrumen implementasi penguatan moderasi beragama.
- 3) Pemenuhan anggaran.

²⁴ RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, iv.

²⁵ *Ibid.*, 62-66.

- 4) Program penguatan moderasi beragama berbasis tugas dan fungsi.
- 5) Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama.

b. Tahun 2022: Penyelenggaraan layanan dan program keagamaan berperspektif moderasi beragama. Tahap ini ditempuh melalui agenda sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan penguatan pelayanan public berperspektif moderasi beragama.
- 2) Pelibatan pemangku kepentingan dalam implementasi moderasi beragama.

c. Tahun 2023: Penguatan peran masyarakat dalam penguatan moderasi beragama. Tahap ini ditempuh melalui agenda sebagai berikut:

- 1) Penguatan pelibatan pemangku kepentingan dengan fasilitasi program masyarakat untuk implementasi moderasi beragama.
- 2) Peningkatan fasilitasi program masyarakat sesuai tugas dan fungsi.

d. Tahun 2024: Peneguhan dan apresiasi negara dan bangsa berperspektif moderasi beragama. Capaian tahap ini ditandai dengan parameter sebagai berikut:

- 1) Tercapainya indeks-indeks sesuai target.
- 2) Pemenuhan regulasi akan hak sipil berbasis moderasi beragama.
- 3) Penurunan jumlah kasus konflik atas nama agama.
- 4) Apresiasi implementasi moderasi beragama.

2. Indikator Kinerja Penguatan Moderasi Beragama

Dalam mengukur kesuksesan program penguatan moderasi beragama. Kemenag menentukan capaian dari program yang telah dilaksanakan

berdasarkan dari tiga indeks. Berikut merupakan tiga indeks yang menjadi indikator kinerja penguatan moderasi beragama:²⁶

Pertama, Indeks kesalehan umat beragama dinilai berdasarkan dari kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama melalui bentuk kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, melestarikan lingkungan, serta kepatuhan terhadap pemerintah dan negara.

Kedua, Indeks kerukunan umat beragama dinilai berdasarkan dari gambaran realitas kerukunan umat beragama dalam kehidupan sosial keagamaan melalui sikap toleransi, kerja sama antar umat beragama dan kesetaraan.

Ketiga, Indeks penerimaan umat beragama dinilai berdasarkan dari keselarasan relasi agama dan budaya melalui sikap akomodatif umat beragama terhadap budaya dan penurunan konflik atas dasar agama.

Berikut akan disajikan target program kerja penguatan moderasi beragama:

Tabel 3. 1: Indikator Kerja Penguatan Moderasi Beragama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2019)	Target Kinerja (2024)
1.	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama	83,58%	86,08%

²⁶ Ibid., 45-46.

2.	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	73,83 %	75,80 %
3.	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	N/A	76 %

Berdasarkan tabel 3. 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 indeks kesalehan umat beragama adalah 83,58% dan target yang harus dipenuhi pada tahun 2024 adalah 86, 08%. Pada tahun 2019 Indeks kerukunan umat beragama adalah 73,83 % dan target yang harus dicapai adalah 75,80 % di tahun 2024. Pada tahun 2019 Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya adalah N/A (tidak ada) dan target yang harus dicapai adalah 76,80 % di tahun 2024.²⁷

²⁷ Ibid.

BAB IV

ANALISIS WACANA KRITIS STRATEGI PENGUATAN MODERASI

BERAGAMA

Pada teori AWK Norman Fairclough mencakup tiga dimensi yaitu teks, praktik wacana dan praktik sosiokultural. Dalam pembahasan bab ini akan dipaparkan sedikit tentang strategi penguatan moderasi beragama Kementerian Agama. Kemudian setelah dilakukan pemaparan, konten tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori AWK tiga dimensi Norman Fairclough.

A. Analisis Teks

Dimensi teks yang digambarkan oleh Fairclough merupakan tahapan pertama dalam mengamati sebuah fenomena wacana yang sedang terjadi di sekitar kita. Fungsi teks tidak hanya dapat menggambarkan tentang bagaimana suatu objek dijelaskan, tetapi juga dapat menjelaskan bagaimana teks-teks tersebut dihubungkan dan didefinisikan. Pada tahap ini, objek teks dan hubungan antar objek teks dianalisis dengan pendekatan anak kalimat dan kombinasi anak kalimat, namun tetap memperhatikan kosa kata, semantik dan sintaksis. Tujuan pada tahap ini adalah penulis dapat melihat ideologi dan wacana yang hadir dalam suatu hubungan antar objek terkait melalui sebuah teks.¹ Berikut akan disajikan hasil dari analisis teks wacana:

1. Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah

¹ Yoga Walanda Caesareka dan Catur Nugroho, "Komodifikasi Agama pada Produk Fashion (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Desain Kaus 'Keepers of the Deen')," *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 2 (2020), 4.

a. Anak Kalimat

1. Penguatan cara pandang: Anak kalimat ini mengacu pada tindakan memperkuat atau meningkatkan cara pandang. "Cara pandang" merujuk pada sudut pandang, perspektif, atau cara seseorang memahami dan melihat agama. Dalam konteks ini, anak kalimat ini menekankan pentingnya upaya untuk memperkuat dan mempertajam sudut pandang yang seimbang dan moderat terhadap agama.
2. Penguatan sikap: Anak kalimat ini mengacu pada tindakan memperkuat atau meningkatkan sikap. "Sikap" merujuk pada sikap mental, pandangan, atau pendekatan terhadap sesuatu. Dalam konteks ini, anak kalimat ini menyoroti pentingnya upaya untuk memperkuat dan memperbaiki sikap yang toleran, inklusif, dan saling menghormati dalam praktik beragama.
3. Penguatan praktik beragama jalan tengah: Anak kalimat ini mengacu pada tindakan memperkuat atau meningkatkan praktik beragama yang mengikuti pendekatan jalan tengah. "Praktik beragama" merujuk pada tindakan atau kegiatan yang terkait dengan agama, seperti ibadah, ritual, atau praktik keagamaan sehari-hari. Dalam konteks ini, anak kalimat ini menekankan pentingnya upaya untuk memperkuat dan mengembangkan praktik beragama yang mengikuti pendekatan moderat atau jalan tengah.

b. Kombinasi Anak Kalimat

Dalam kombinasi anak kalimat "Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah," terdapat tiga anak kalimat yang saling terkait.

Penguatan cara pandang bertujuan untuk memperkuat sudut pandang yang seimbang dan moderat terhadap agama. Penguatan sikap bertujuan untuk memperkuat sikap yang toleran, inklusif, dan saling menghormati dalam praktik beragama. Sedangkan penguatan praktik beragama jalan tengah bertujuan untuk memperkuat praktik beragama yang mengikuti pendekatan moderat atau jalan tengah.

Kombinasi ketiga anak kalimat ini menekankan makna bahwa ada suatu usaha atau tindakan untuk memperkuat cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengadopsi pendekatan jalan tengah. Ini dapat diartikan sebagai pengembangan atau penguatan suatu bentuk agama atau keyakinan yang tidak ekstrem atau fanatik, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang penting dan esensial. Dalam konteks yang lebih luas, kalimat ini bisa berarti adanya upaya untuk mencari keselarasan antara berbagai perspektif dalam beragama, mengembangkan sikap yang inklusif dan toleran, serta mendorong praktik yang seimbang dan moderat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan harmoni dan pemahaman antara penganut agama yang berbeda dalam masyarakat.

2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama

a. Anak Kalimat

1. Penguatan harmoni: Anak kalimat ini mengacu pada tindakan memperkuat atau meningkatkan harmoni. "Harmoni" merujuk pada keadaan keselarasan, kesepakatan, atau keseimbangan antara individu atau

kelompok yang berbeda dalam konteks ini. Dalam konteks penguatan harmoni umat beragama, anak kalimat ini menekankan pentingnya upaya untuk memperkuat dan mempertahankan keselarasan dan kesepakatan antar umat beragama.

2. Kerukunan umat beragama: Anak kalimat ini mengacu pada kondisi damai, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan harmoni antar umat beragama yang berbeda. "Kerukunan" merujuk pada keadaan hidup bersama secara damai, sementara "umat beragama" mengacu pada kelompok individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dalam konteks ini, anak kalimat ini menyoroti pentingnya menciptakan dan memperkuat kerukunan antar umat beragama

b. Kombinasi Anak Kalimat

Dalam kombinasi anak kalimat "Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama," terdapat dua anak kalimat yang saling terkait. Penguatan harmoni bertujuan untuk memperkuat keselarasan dan kesepakatan, sementara kerukunan umat beragama bertujuan untuk menciptakan keadaan damai dan saling menghormati antar umat beragama. Kombinasi kedua anak kalimat ini menekankan pentingnya upaya untuk memperkuat hubungan yang harmonis dan kerukunan antar umat beragama dengan menciptakan dan mempertahankan keseimbangan serta hidup bersama secara damai dan saling menghormati.

Dalam konteks yang lebih luas, kalimat ini mencerminkan pentingnya menjaga dan memperkuat toleransi antar umat beragama, menghargai perbedaan, serta mempromosikan dialog dan pemahaman antar agama yang berbeda. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan damai di mana semua orang dapat hidup bersama secara harmonis tanpa adanya konflik agama.

3. Penyelarasan relasi agama dan budaya

a. Anak Kalimat

1. Penyelarasan relasi agama: Anak kalimat ini mengacu pada tindakan menyelaraskan atau mencocokkan hubungan antara agama dengan faktor-faktor lainnya. "Relasi agama" merujuk pada hubungan atau interaksi yang terjadi antara agama dan aspek-aspek lain dalam konteks sosial, budaya, atau kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, anak kalimat ini menyoroti pentingnya upaya untuk menyelaraskan hubungan antara agama dengan faktor-faktor lain agar terdapat keseimbangan, keselarasan, dan saling mendukung.
2. Budaya: Anak kalimat ini menambahkan dimensi budaya ke dalam kalimat. "Budaya" merujuk pada aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan kebiasaan, nilai-nilai, tradisi, seni, dan cara hidup suatu masyarakat atau kelompok. Dalam konteks ini, anak kalimat ini menunjukkan bahwa penyelarasan yang dibicarakan juga melibatkan aspek budaya dalam hubungan dengan agama.

b. Kombinasi Anak Kalimat

Dalam kombinasi anak kalimat "Penyelarasan relasi agama dan budaya," terdapat dua anak kalimat yang saling terkait. Penyelarasan relasi agama bertujuan untuk mencapai hubungan yang seimbang, harmonis, dan saling mendukung antara agama dengan faktor-faktor lain dalam konteks sosial atau kehidupan masyarakat. Sementara itu, penambahan anak kalimat "dan budaya" menyoroti pentingnya juga menyelaraskan hubungan agama dengan aspek budaya dalam rangka menciptakan keselarasan yang lebih luas.

Kombinasi kedua anak kalimat ini menekankan pentingnya upaya untuk menyelaraskan dan mencocokkan hubungan antara agama dengan faktor-faktor budaya dalam rangka mencapai keselarasan, keseimbangan, dan keselarasan yang lebih komprehensif antara agama dan budaya dalam konteks sosial dan kehidupan masyarakat.

4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama

a. Anak Kalimat

1. Peningkatan kualitas pelayanan": Anak kalimat ini mengacu pada tindakan meningkatkan mutu atau standar pelayanan. "Kualitas pelayanan" merujuk pada tingkat kecakapan, keefektifan, dan kepuasan dalam memberikan pelayanan kepada individu atau kelompok. Dalam konteks ini, anak kalimat ini menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan mutu dan standar pelayanan yang diberikan dalam konteks kehidupan beragama.

2. Kehidupan beragama: Anak kalimat ini mengacu pada aspek-aspek kehidupan yang terkait dengan agama, seperti keyakinan, praktik keagamaan, interaksi sosial dalam konteks keagamaan, dan pengalaman spiritual. Dalam konteks ini, anak kalimat ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dibicarakan terkait dengan kehidupan beragama secara umum.

b. Kombinasi Anak Kalimat

Dalam kombinasi anak kalimat "Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama," terdapat dua anak kalimat yang saling terkait. Peningkatan kualitas pelayanan bertujuan untuk meningkatkan mutu, keefektifan, dan kepuasan dalam memberikan pelayanan terkait dengan kehidupan beragama. Anak kalimat "kehidupan beragama" menekankan bahwa pelayanan yang ditingkatkan ini terkait dengan aspek-aspek kehidupan yang terkait dengan agama.

Kombinasi kedua anak kalimat ini menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan mutu dan standar pelayanan yang diberikan dalam konteks kehidupan beragama. Pelayanan tersebut meliputi aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan beragama, seperti memberikan dukungan spiritual, pendidikan agama, bimbingan, atau pelayanan sosial yang berkaitan dengan kebutuhan agama individu atau kelompok.

5. Pengembangan ekonomi dan Sumber daya Keagamaan

a. Anak Kalimat

1. Pengembangan ekonomi: Anak kalimat ini mengacu pada tindakan mengembangkan atau meningkatkan aspek ekonomi. "Ekonomi" merujuk pada aspek-aspek terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, anak kalimat ini menyoroti pentingnya upaya untuk mengembangkan aspek ekonomi yang terkait dengan keagamaan.
2. Sumber daya keagamaan: Anak kalimat ini mengacu pada sumber daya yang berkaitan dengan keagamaan. "Sumber daya keagamaan" dapat mencakup berbagai hal, seperti tempat ibadah, fasilitas keagamaan, pemimpin agama, pengetahuan agama, dan dukungan komunitas. Dalam konteks ini, anak kalimat ini menunjukkan pentingnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang terkait dengan keagamaan.

b. Kombinasi Anak Kalimat

Dalam kombinasi anak kalimat "Pengembangan ekonomi dan Sumber daya Keagamaan," terdapat dua anak kalimat yang saling terkait. Pengembangan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan aspek ekonomi yang terkait dengan keagamaan, seperti pengembangan bisnis atau kegiatan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip keagamaan. Sementara itu, anak kalimat "Sumber daya keagamaan" menyoroti pentingnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang berkaitan dengan keagamaan untuk mendukung kehidupan keagamaan yang lebih baik.

Kombinasi kedua anak kalimat ini menunjukkan pentingnya upaya untuk mengembangkan aspek ekonomi yang terkait dengan keagamaan serta mengoptimalkan sumber daya yang berkaitan dengan keagamaan. Hal ini dapat mencakup pengembangan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, pemanfaatan sumber daya keagamaan yang ada, serta pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan terhadap sumber daya tersebut untuk keberlanjutan dan kemajuan kehidupan keagamaan.

B. Praktik Wacana

Pada dimensi praktik wacana, Fairclough menjelaskan kandungan dari praktik wacana yang meliputi: proses produksi, konsumsi dan interpretasi dari sebuah wacana dalam kaitannya antara teks dengan organisasi di masyarakat atau suatu lembaga tertentu. Praktik wacana ini tidak hanya mencakup produksi teks tetapi juga cara teks diedarkan, ditafsirkan, dan ditanggapi oleh berbagai kalangan yang membacanya.²

1. Penguatan Cara Pandang, Sikap dan Praktik Beragama Jalan Tengah

a. Teks Wacana

“Strategi program yang akan dijalankan oleh Kemenag adalah: Pertama, Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran. Kedua, pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa. Ketiga, pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat. Keempat, penguatan sistem pendidikan yang

² Diah Kristina, dkk., *Analisis wacana kritis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 9.

berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru. Kelima, penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan.”³

b. Hasil Analisis Praktik Wacana

- 1) Penulis teks tersebut berasal dari tim Kementerian Agama RI. Kementerian adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi urusan agama di Indonesia. Oleh karena itu, teks tersebut merupakan pernyataan resmi kebijakan pemerintah tentang moderasi beragama. Teks tersebut berasal dari dokumen resmi Kementerian Agama RI.
- 2). Audiensi yang dituju pada teks tersebut ditujukan pada semua pejabat pemerintah, para tokoh agama, dan masyarakat umum di Indonesia. Teks ini dirancang untuk meyakinkan audiens tentang pentingnya moderasi beragama dan untuk menguraikan rencana tindakan untuk mencapai tujuan ini. Teks ditulis dalam register formal, yang menunjukkan bahwa itu ditujukan untuk audiensi yang berpendidikan
- 3) Cara teks dikonsumsi akan memengaruhi interpretasinya. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai langkah positif untuk mempromosikan moderasi beragama di Indonesia. Orang lain mungkin melihatnya sebagai upaya pemerintah untuk mengontrol aktivitas keagamaan. Perlu diingat

³ Tim Pokja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 49-50.

dalam masyarakat Indonesia yang beragam ini, akan ada pihak-pihak yang kurang setuju dengan agenda tersebut. Seperti pada Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM) yang menolak moderasi beragama dikarenakan pada terminologi kata moderasi berasal dari barat dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai islam karena didasarkan pada nilai-nilai sekuler dan demokrasi liberal. Mereka juga menolak konsep moderasi beragama masuk ke dalam kurikulum pesantrennya, dikarenakan dalam kurikulum mereka sudah menganut sistem *wasathiyah* dan *tawazun*.⁴ Menurut Dr. Ma'mun Murod, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menerangkan dalam tulisannya bahwa dalam praktik *deradikalisasi* di Indonesia sering kali mengambil sikap berhadapan (*vis a vis*) dengan orang yang dianggap radikal. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama yang berusaha menengahi dan mengayomi dengan cara yang bijaksana. Oleh karena itu ketika praktik moderasi beragama yang saling berhadap-hadapan dengan pelaku yang dianggap radikal, maka moderasi beragama tersebut dianggap tidak bermakna.⁵

- 4) Secara keseluruhan, praktik wacana pada teks tersebut terdapat sejumlah program dan inisiatif yang dirancang untuk mendorong moderasi beragama, seperti pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat dakwah agama

⁴ Admin, "*Risalah Tegalsari Kritik Moderasi Beragama*", <https://www.pesantrenmuadalah.id/berita/risalah-tegalsari-kritik-moderasi-beragama/>, diakses pada 5 Juli 2023.

⁵ Ma'mun Murod Al-Barbasy, "*Moderasi Beragama Tanpa Makna*", <https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpa-makna/>, diakses pada 15 Juli 2023.

yang toleran dan penguatan sistem pendidikan yang berwawasan moderat. Hal tersebut mencerminkan komitmen Kemenag dalam mendorong moderasi beragama di Indonesia. Teks tersebut bertujuan untuk meyakinkan audiens yang berbeda tentang pentingnya moderasi beragama dan menguraikan rencana tindakan untuk mencapai tujuan ini. Keefektifan teks akan bergantung pada bagaimana teks tersebut dikonsumsi oleh audiens yang beragam ini.

2. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama

a. Teks Wacana

“Strategi program yang akan dijalankan oleh Kemenag adalah: Pertama, perlindungan umat beragama untuk menjamin hak sipil dan hak beragama. Kedua, penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.”⁶

b. Hasil Analisis Praktik Wacana

- 1) Penulis teks tersebut berasal dari tim Kementerian Agama RI. Kementerian adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi urusan agama di Indonesia. Oleh karena itu, teks tersebut merupakan

⁶RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, 50.

pernyataan resmi kebijakan pemerintah tentang moderasi beragama. Teks tersebut berasal dari dokumen resmi Kementerian Agama RI.

- 2) Audiensi yang dituju pada teks tersebut ditujukan pada semua pejabat pemerintah, TNI, Polri, Organisasi FKUB, para tokoh agama, dan masyarakat umum di Indonesia. Teks ini dirancang untuk meyakinkan audiens tentang pentingnya menjaga harmoni dan kerukunan umat beragama di Indonesia agar semua masyarakat dapat hidup dengan damai. Teks ditulis dalam register formal, yang menunjukkan bahwa itu ditujukan untuk audiensi yang berpendidikan
- 3) Cara teks dikonsumsi akan memengaruhi interpretasinya. Strategi tersebut akan ditafsirkan oleh para pembacanya dengan cara yang berbeda, mereka juga dapat menanggapi strategi dengan cara yang berbeda, seperti dengan mendukungnya, menentangnya, atau mengusulkan strategi baru. Jika seorang pemuka agama membaca teks tersebut, maka kebanyakan pemuka agama akan menafsirkan bahwa teks tersebut merupakan ajakan Kemenag untuk membangun kerukunan antar umat beragama.
- 4) Secara keseluruhan, praktik wacana pada teks tersebut terdapat sejumlah program yang dirancang untuk mendorong harmoni dan kerukunan umat beragama, seperti penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong dalam masyarakat. Hal tersebut mencerminkan komitmen Kemenag dalam mendorong kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam teks tersebut

juga diterangkan bahwa dalam menciptakan harmoni dan kerukunan umat beragama di Indonesia, Kemenag tidak bisa bekerja sendiri dibutuhkan juga bantuan dari berbagai instansi pemerintahan seperti, Instansi TNI dan Polri yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat dan berbagai elemen masyarakat untuk membantu mewujudkan harmoni dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

3. Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya

a. Analisis Wacana

“Strategi program yang akan dijalankan oleh Kemenag adalah: Pertama, penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama. Kedua, pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama. Ketiga, pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.”⁷

b. Hasil Analisis Praktik Wacana

- 1) Penulis teks tersebut berasal dari tim Kementerian Agama RI. Kementerian adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi urusan agama di Indonesia. Oleh karena itu, teks tersebut merupakan pernyataan resmi kebijakan pemerintah tentang moderasi beragama. Teks tersebut berasal dari dokumen resmi Kementerian Agama RI.
- 2) Audiensi yang dituju pada teks tersebut ditujukan pada semua pejabat pemerintah, para seniman, para tokoh adat, budayawan, para tokoh agama,

⁷ RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, 53.

dan masyarakat umum di Indonesia. Teks ini dirancang untuk meyakinkan audiens tentang pentingnya menjaga keselarasan antara budaya dan agama di Indonesia agar semua masyarakat dapat hidup damai dengan tetap melestarikan budaya dan menjalankan agamanya masing-masing. Teks ditulis dalam register formal, yang menunjukkan bahwa itu ditujukan untuk audiensi yang berpendidikan

3) Cara teks dikonsumsi akan memengaruhi interpretasinya. Strategi tersebut akan ditafsirkan oleh para pembacanya dengan cara yang berbeda, mereka juga dapat menanggapi strategi dengan cara yang berbeda, seperti dengan mendukungnya, menentangnya, atau mengusulkan strategi baru. Jika seorang pemuka agama membaca teks tersebut, maka kebanyakan pemuka agama akan menafsirkan bahwa teks tersebut merupakan ajakan Kemenag untuk membangun keselarasan antara agama dan budaya. Namun tetap akan ada kelompok agama yang menolak, seperti dari kelompok Wahabi yang secara terang-terangan menentang acara tahlilan dan maulidan di Indonesia.⁸

4) Secara keseluruhan praktik wacana pada teks tersebut terdapat sejumlah program yang dirancang untuk mendorong penyelarasan relasi agama dan budaya. Salah satu cara yang ditawarkan adalah penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama dan pembuatan promosi toleransi antar

⁸ Hasbi Aswar, "Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia," *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2016), 25.

umat beragama pada saat perayaan agama. Pada teks tersebut menyatakan pentingnya menghormati ekspresi budaya berdasarkan nilai-nilai agama. Hal ini kemudian membuktikan bahwa pemerintah mendukung hal tersebut. Kemudian dalam sejarahnya dakwah penyebaran agama Islam dapat berkembang dengan pesat melalui pendekatan budaya. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cinta terhadap budayanya sendiri.⁹ Teks tersebut kemudian berargumen bahwa mengembangkan literasi dalam khazanah budaya dengan nafas religius dapat membantu mendorong toleransi. Ini memberikan bukti untuk klaim ini dengan menunjukkan bahwa ketika orang memahami makna religius dari ekspresi budaya, mereka lebih cenderung toleran terhadap mereka yang menjalankan agama yang berbeda. Terakhir, teks tersebut berpendapat bahwa menggunakan perayaan agama dan budaya untuk memperkuat toleransi adalah cara yang efektif untuk mempromosikan pemahaman antar agama. Ini memberikan bukti untuk klaim ini dengan menunjukkan bahwa perayaan agama dan budaya dapat menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan membantu mereka untuk belajar tentang budaya dan kepercayaan satu sama lain.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

a. Analisis Wacana

“Strategi program yang akan dijalankan oleh Kemenag adalah: Pertama, peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan. Kedua, peningkatan

⁹ Ashadi Cahyadi, “Pengembangan Dakwah Melalui Gerakan Kebudayaan,” *Jurnal Ilmiah Syi’ar*, Vol. 18, No. 2, (Agustus 2018): 74.

pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga. Ketiga, penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal. Keempat, peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.”¹⁰

b. Hasil Analisis

- 1) Penulis teks tersebut berasal dari tim Kementerian Agama RI. Kementerian adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi urusan agama di Indonesia. Oleh karena itu, teks tersebut merupakan pernyataan resmi kebijakan pemerintah tentang penguatan moderasi beragama. Teks tersebut berasal dari dokumen resmi Kementerian Agama RI.
- 2) Audiensi yang dituju pada teks tersebut ditujukan pada semua pejabat pemerintah, para pelayan publik, para tokoh agama, dan masyarakat umum di Indonesia. Teks ini dirancang untuk meyakinkan audiens tentang pentingnya pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan publik pada semua masyarakat agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Teks tersebut ditulis dalam register formal, yang menunjukkan bahwa itu ditujukan untuk audiensi yang berpendidikan
- 3) Cara teks dikonsumsi akan memengaruhi interpretasinya. Strategi tersebut akan ditafsirkan oleh para pembacanya dengan cara yang berbeda, mereka juga dapat menanggapi strategi dengan cara yang berbeda, seperti dengan mendukungnya, menentangnya, atau mengusulkan strategi baru. Jika seorang pemuka agama membaca teks tersebut, maka kebanyakan pemuka

¹⁰ RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, 53-56.

agama akan menafsirkan bahwa teks tersebut merupakan ajakan Kemenag untuk pegawai pemerintah terutama dalam sektor pelayanan keagamaan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan mayoritas orang pasti akan setuju jika ada peningkatan pelayanan keagamaan. Namun beberapa masyarakat mungkin akan tidak setuju jika terdapat perubahan kebijakan tentang pelayanan keagamaan. Seperti contohnya jika terdapat peningkatan pelayanan haji dengan diiringi meningkatnya juga harga yang harus dibayarkan, tentu masyarakat yang mempunyai dana haji yang terbatas, maka akan merasa keberatan atas kebijakan tersebut.¹¹

- 4) Secara keseluruhan praktik wacana pada teks tersebut terdapat sejumlah program yang dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Salah satu cara yang ditawarkan adalah peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga dan penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal. Penulis meyakini bahwa hampir semua orang pasti setuju atas adanya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, namun tentu akan ada beberapa pihak yang kurang setuju dengan cara yang akan dilakukan oleh Kemenag dalam meningkatkan kebijakan tersebut. Contohnya: pada bimbingan perkawinan dan keluarga, mungkin sebagian besar orang perlu untuk melakukan bimbingan pernikahan tersebut agar kelak nanti mereka dapat membangun keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*. Namun perlu diingat

¹¹ Novrizaldi, "Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2023, Rata-Rata Untuk Jamaah Reguler Sebesar Rp 90 Juta", <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-sepakati-biaya-haji-2023-rata-rata-untuk-jamaah-reguler-sebesar-rp-90-juta>, diakses pada 5 Juli 2023.

akan ada beberapa orang yang kurang setuju atas kebijakan tersebut karena dianggap kebijakan tersebut mempersulit orang lain untuk menikah.¹² Pada penyelenggaraan jaminan produk halal penulis merasa semua umat Islam pasti akan sangat setuju atas jaminan produk halal pada setiap makanan kemasan dan orang-orang non muslim akan bersikap netral terhadap kebijakan tersebut.

5. Pengembangan ekonomi dan Sumber daya Keagamaan

a. Analisis Wacana

“Strategi program yang akan dijalankan oleh Kemenag adalah: Pertama, pengelolaan dan pemberdayaan dana sosial keagamaan perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip adil dan berimbang. Kedua, pengembangan kelembagaan ekonomi umat. Ketiga, pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.”¹³

b. Hasil Analisis

- 1) Penulis teks tersebut berasal dari tim Kementerian Agama RI. Kementerian adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi urusan agama di Indonesia. Oleh karena itu, teks tersebut merupakan pernyataan resmi kebijakan pemerintah tentang penguatan moderasi beragama. Teks tersebut berasal dari dokumen resmi Kementerian Agama RI.

¹² Abi Hasan, “Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2022), 21.

¹³ RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, 56-58.

- 2) Audiensi yang dituju pada teks tersebut ditujukan adalah semua pejabat pemerintah, lembaga filantropi, para tokoh agama, dan masyarakat umum di Indonesia. Teks ini dirancang untuk meyakinkan audiens tentang pentingnya pemerintah yang bertugas mengembangkan ekonomi dan sumber daya keagamaan agar dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Teks tersebut ditulis dalam register formal, yang menunjukkan bahwa itu ditujukan untuk audiensi yang berpendidikan.

- 3) Cara teks dikonsumsi akan memengaruhi interpretasinya. Strategi tersebut akan ditafsirkan oleh para pembacanya dengan cara yang berbeda, mereka juga dapat menanggapi strategi dengan cara yang berbeda, seperti dengan mendukungnya, menentangnya, atau mengusulkan strategi baru. Jika seorang pemuka agama membaca teks tersebut, maka kebanyakan pemuka agama akan menafsirkan bahwa teks tersebut merupakan ajakan Kemenag kepada para jajarannya dan pemuka agama untuk mampu mengembangkan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Jika seorang tokoh masyarakat membaca teks tersebut dan menafsirkannya, maka hal tersebut berpeluang untuk mempromosikan pariwisata di komunitasnya dengan menonjolkan warisan agama dan budaya masyarakat seperti halnya di pulau Bali yang terkenal akan destinasi wisatanya terkenal sampai ke mancanegara. Kemudian masyarakat juga khawatir dengan beredarnya isu adanya aliran dana sosial keagamaan yang setelah ditelusuri lebih lanjut, aliran dana tersebut ternyata digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme. Maka dari itu masyarakat berharap pemerintah dapat berperan aktif untuk memonitor

dan menindaklanjuti aliran dana sosial keagamaan yang dicurigai digunakan untuk pendanaan terorisme.¹⁴

- 4) Secara keseluruhan praktik wacana pada teks tersebut terdapat sejumlah program yang dirancang untuk mendorong pengembangan ekonomi dan Sumber daya Keagamaan. Salah satu cara yang ditawarkan adalah dengan cara pengembangan kelembagaan ekonomi umat dan pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemenag ingin agar kelompok masyarakat dapat mengembangkan potensi warisan budaya keagamaan masing-masing daerah agar dapat mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar dan masyarakat khususnya yang beragama Islam berharap pengelolaan dana haji dapat digunakan dengan semestinya dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

C. Praktik Sosiokultural

Dimensi praktik sosiokultural berhubungan dengan konteks meliputi berbagai praktik wacana yang sedang terjadi di masyarakat atau kebudayaan tertentu yang memiliki dampak lebih luas. Kemudian pada dimensi ini juga mengeksplorasi bagaimana struktur sosial, kondisi sejarah, ideologi, dan hubungan kekuasaan membentuk dan dibentuk oleh wacana. Analisis yang digunakan pada dimensi praktik sosiokultural meliputi: situasional, institusional dan Sosial.¹⁵ Pada dimensi praktik sosiokultural ini akan menganalisis strategi

¹⁴ Alfin Heriagus, "Donasi Sosial Sebagai Modus Pendanaan Terorisme di Indonesia", <https://www.ui.ac.id/donasi-sosial-sebagai-modus-pendanaan-terorisme-di-indonesia/>, diakses pada 5 Juli 2023

¹⁵ Kristina, dkk., *Analisis wacana kritis*, 10.

penguatan moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kemenag RI dan akan dianalisis secara umumnya saja. Berikut akan dipaparkan analisis praktik sosiokultural penguatan moderasi beragama Kemenag RI melalui 3 tahapan, yaitu: situasional, institusional dan sosial.

1. Analisis Situasional:

Dalam analisis situasional menurut Norman Fairclough melibatkan pemahaman tentang produksi wacana dan menghubungkannya terhadap konteks di kawasan tersebut. Analisis situasional juga mengkaji wacana dan menghubungkannya dengan kondisi, identitas, norma, dan struktur sosial yang berlaku di kawasan tersebut.¹⁶

Masyarakat Indonesia sangat beragam, tidak hanya dalam hal bahasa, ras, dan budaya, tetapi juga dalam hal agama. Meskipun Islam dipraktikkan oleh sebagian besar orang Indonesia, warga negara ini juga mengikuti sejumlah agama dan ideologi lain. Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu adalah beberapa contoh agama yang juga dianut oleh banyak orang Indonesia. Selain agama sebagian kecil masyarakat Indonesia juga ada yang menganut aliran-aliran kepercayaan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah meskipun keragaman ada di Indonesia sebagian besar masyarakat Indonesia cinta damai dan mampu bersikap toleran terhadap perbedaan.

Berikut akan disampaikan survei pemeluk agama di Indonesia. Pada bulan Desember 2021 jumlah persentase penduduk muslim di Indonesia sebanyak 86,93% dari jumlah total penduduk Indonesia berjumlah sekitar 273, 87 juta

¹⁶ Norman Fairclough, *Critical discourse analysis: the critical study of language*, Language in social life series (London ; New York: Longman, 1995) 28.

jiwa. Jadi total penduduk muslim Indonesia berjumlah sekitar 238,09 juta jiwa. Pemeluk agama Kristen sebanyak 20,45 juta jiwa (7,47%). Pemeluk agama Katolik sebanyak 8,43 juta jiwa (3,08%), pemeluk agama Hindu sebanyak 4,67 juta jiwa (1,71%). Pemeluk agama Buddha sebanyak 2,03 juta jiwa (0,74%). Kemudian pemeluk agama Konghucu 73,63 ribu jiwa (0,03%) dan sisanya ada berbagai aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia sebanyak 126,51 ribu jiwa (0,05%).¹⁷

Meskipun Indonesia memiliki berbagai agama dan aliran kepercayaan yang beragam dan menjamin semua masyarakat Indonesia untuk bisa memilih dan beribadah sesuai keyakinannya, namun Indonesia bukanlah negara teokratis (agama). Indonesia juga bukanlah negara yang menganut ajaran sekuler yang memisahkan sepenuhnya antara agama dengan negara. Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan.¹⁸

Jadi tidak mengherankan jika terdapat banyak aliran atau sekte dalam setiap agama mengingat terdapat perbedaan dari cara pandang pada tataran teologis dan dalam bidang penafsiran agama, semua itu adalah hasil dari kemampuan berpikir setiap orang yang berbeda. Selain itu, tulisan-tulisan keagamaan dalam satu agama ternyata dapat ditafsir secara berbeda-beda, sehingga dapat melahirkan berbagai sekte atau kelompok agama yang tidak sejalan satu sama lain.¹⁹

¹⁷ Viva Budy Kusnandar, "Persentase Pemeluk Agama di Indonesia (31/12/31)", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>, diakses pada 17 Juni 2023.

¹⁸ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 53.

¹⁹ *Ibid.*, 57.

Maka dari itu tujuan dari Moderasi beragama adalah untuk menjaga perdamaian di masyarakat Indonesia yang heterogen, terutama dalam kehidupan beragama yang dianggap sensitif. Dalam penerapannya moderasi beragama berusaha untuk mempraktikkan ajaran agama yang cinta damai terhadap sesama manusia dan berusaha membuat berbagai pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem yang dapat mengakibatkan kerugian untuk orang lain maupun agama lain.

2. Analisis Institusional

Pada tahap institusional, berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal.²⁰ Institusi yang dimaksud dalam tahap ini adalah Kementerian agama. Kemudian pada tahap ini akan menganalisis tentang penguatan moderasi beragama di Indonesia. Berikut akan dipaparkan pengaruh Kemenag secara internal maupun eksternal tentang penguatan moderasi beragama di Indonesia.

Kementerian agama adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan berbagai agama resmi di Indonesia. Kemenag juga memiliki tugas penting untuk mempromosikan toleransi beragama dan melindungi hak-hak beragama kepada semua pemeluk agama resmi di Indonesia. Selain itu Kemenag juga bertugas untuk melakukan bimbingan agama dan mengembangkan warisan agama. Kemenag memainkan

²⁰ Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif* (Bandung: Refika Aditama, 20, 104.

peranan penting baik secara internal maupun eksternal dalam memperkuat moderasi beragama di negara ini.²¹

Dalam pengaruhnya secara internal Kementerian Agama berwenang untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan urusan agama di Indonesia. Ini dapat mengembangkan kebijakan yang mempromosikan moderasi, toleransi, dan inklusivitas agama, dan mencegah ideologi atau praktik ekstremis. Kementerian Agama mengawasi pendidikan agama dan pengembangan kurikulum. Hal itu dapat mendorong pemahaman ajaran agama yang seimbang dan moderat, menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan menghargai perbedaan. Ini dapat membantu membentuk pola pikir generasi di masa depan yang moderat.

Secara eksternal, Kemenag juga telah bekerja untuk mempromosikan konsep moderasi beragama di tingkat internasional. Misalnya, perwakilan dari Kemenag yaitu Abu Rokhmad (staf ahli menteri agama) memaparkan strategi pemerintah Indonesia dalam mencegah ideologi dan kegiatan ekstremisme dan terorisme dengan menggunakan pendekatan moderasi beragama dalam acara *The World Muslim Communities Council* yang diselenggarakan di Abu Dhabi.²² Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Kemenag dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan mengatasnamakan agama. Kemenag juga masih perlu untuk terus mengimplementasikan program dan inisiatifnya, dan juga perlu

²¹ Kementerian Agama RI, “*Tugas dan Fungsi*”, <https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi>, diakses pada 7 Juli 2023.

²² Kontributor, “*Kemenag Kenalkan Moderasi Beragama pada Dunia Islam*”, <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-kenalkan-moderasi-beragama-pada-dunia-islam-0awac8>, diakses pada 7 Juli 2023.

bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi masyarakat sipil dan publik figur untuk mempromosikan moderasi beragama di Indonesia.

3. Analisis Sosial

Analisis sosial menurut Norman Fairclough melibatkan pemahaman tentang bagaimana wacana memengaruhi atau dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih luas. Analisis ini melibatkan pemeriksaan hubungan wacana dengan sistem politik, ekonomi dan sistem budaya masyarakat secara keseluruhan.²³ Pada tahap ini akan menganalisis penguatan moderasi beragama di Indonesia.

Moderasi beragama memainkan peran penting dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Perspektif keagamaan yang moderat menekankan toleransi, pemahaman, dan penghormatan terhadap keyakinan dan praktik yang berbeda. Sehingga dapat membantu mempromosikan kohesi dan harmoni sosial dalam masyarakat yang heterogen. Ketika orang-orang dari agama yang berbeda dapat hidup dan bekerja sama dengan damai, itu menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman dan dihormati. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera.

Moderasi beragama juga dapat membantu melawan ekstremisme dan kekerasan dalam masyarakat yang heterogen. Ketika orang toleran terhadap keyakinan yang berbeda, mereka cenderung tidak tertarik pada ideologi ekstremis. Ini karena mereka lebih cenderung melihat nilai dalam perspektif yang berbeda dan terbuka untuk berdialog. Sikap seorang yang moderat juga tidak akan mudah

²³ Darma, *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*, 104.

terpengaruh oleh hasutan-hasutan orang-orang yang memiliki kepentingan politik di media sosial. Sering kali media sosial digunakan sebagai alat propaganda untuk menyampaikan berita hoaks.

Tanggung jawab Kemenag dalam mempromosikan moderasi beragama di Indonesia, tidak serta-merta berjalan dengan mulus. Meskipun ideologi yang moderasi beragama yang disampaikan oleh Kemenag adalah ideologi yang baik karena dapat menciptakan harmoni kerukunan dalam masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi Kemenag adalah *pertama*, munculnya berbagai aliran ekstrem dengan mengatasnamakan agama. *Kedua*, munculnya politik identitas berbasis agama. *Ketiga*, penyingkiran otoritas keagamaan di era disrupsi.

Perubahan yang terjadi begitu cepat, mendasar, dan hampir di setiap elemen kehidupan manusia baik itu agama, ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan politik menjadi ciri era disrupsi telah dimulai. Munculnya beragam informasi yang lebih baru muncul dan dapat meluas dengan cepat merupakan akibat dari era disrupsi yang tidak dapat dihindari. Salah satu dampak negatif era disrupsi adalah terjadi pergeseran budaya belajar agama yang dulu kepada orang-orang yang kompeten dalam bidang agama, namun sekarang generasi muda cenderung untuk belajar agama dengan menggunakan media daring melalui berbagai *website* yang tidak diketahui secara pasti siapa penulisnya dan apakah mereka memiliki kompetensi dalam bidang tersebut.²⁴

Seiring berjalannya era disrupsi ini cara pandang sikap beragama juga akan mengalami perubahan seiring dengan konten-konten yang sering dilihat. beragam

²⁴ Toguan Rambe dan Seva Maya Sari, "Toleransi Beragama Di Era Disrupsi: Potret Masyarakat Multikultural Sumatera Utara," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 6, no. 1 (Juni 2020):134.

Informasi bisa diakses dengan begitu mudah seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam konteks ini termasuk isu-isu atau paham keagamaan. Salah satu dampak era disrupsi adalah masuknya konten negatif yang dapat mengubah cara pandang sikap beragama adalah konten yang mengajarkan tentang ideologi radikalisme dan ekstremisme yang disebarkan lewat media informasi membuat masyarakat awam lebih mudah terpengaruh. Hal ini lantaran konten yang mengajarkan radikalisme atau ekstremisme yang mengatasnamakan agama bisa dikemas dengan menarik dan dapat memicu konflik dengan orang lain dengan mengatasnamakan agama. Tentu akibat dari wacana tersebut dapat mengancam cara pandang dan sikap moderat para yang dalam hal ini para generasi muda, karena generasi merekalah yang sering menggunakan internet.²⁵

Dilihat dari sudut pandang politik, agama dipandang sebagai alat untuk menarik seseorang atau kelompok agar para elite mendapatkan dukungan dan memperoleh kekuasaan, Jadi agama dianggap sebagai komoditas politik yang layak untuk didapatkan. Identitas agama dijadikan sebagai alat politik dan legitimasi karena menarik emosi dan rasa memiliki masyarakat.²⁶ Jika hal tersebut sampai terjadi, maka akan berpotensi memecah belah, karena menjadikan agama sebagai tujuan politik dan berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak adil karena berpihak pada salah satu agama.

Ditambah pada saat menjelang pemilu kondisi masyarakat Indonesia mengalami perubahan. Karena pada saat itu sering dijumpai tokoh-tokoh politik mulai menyebarkan berbagai isu negatif terhadap lawan politiknya. Salah satu

²⁵ Ibid., 135.

²⁶ Sukri Ali, "Identitas Politik Agama," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, (Januari 2020), 25.

cara yang digunakan adalah dengan menggunakan politik identitas berbasis agama.²⁷ Hal ini dapat mengancam pluralis masyarakat dan menimbulkan konflik. Maka dari itu Kemenag berharap bahwa politik identitas yang berbasis agama tidak dijadikan sebagai alat politik karena berpotensi menjadi ancaman bagi kerukunan umat beragama. Namun, kenyataannya sering kali berbeda. Dalam memuaskan hasrat para elite politik, cara apa saja bisa dilakukan untuk mendapatkan kendali, sekalipun itu dapat menciptakan konflik.

Namun perlu diketahui bahwa tantangan tersebut akan sulit memecahkan persatuan masyarakat Indonesia. Dikarenakan Kemenag sampai sekarang masih terus mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama yang bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Ditambah pada dasarnya masyarakat Indonesia secara umum berperilaku secara moderat dan didukung oleh berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang moderat. Membuat kontribusi masyarakat dan ormas sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan beragama. Selain terdapat ormas keagamaan, beberapa di antaranya terdapat ormas keagamaan yang cinta tanah air berkomitmen untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.²⁸

Salah satu rahasia utama bangsa Indonesia dapat menjaga harmoni kerukunan masyarakat hingga saat ini adalah budaya gotong royong. Budaya ini sangat penting untuk dilestarikan karena budaya ini syarat akan nilai moral yang tinggi, yaitu saling tolong-menolong, kebersamaan dan rasa empati yang tinggi.

²⁷ M. Taufiq Rahman, *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial* (Bandung: Prodi S2 SAA UIN Sunan Gunung Djati, 2020) 7-8.

²⁸ RI, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2020-2024*, 27-28.

Sikap tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pada saat terjadi bencana di suatu daerah, maka akan terlihat di daerah tersebut bantuan dana sosial untuk korban bencana dan akan ditemukan banyak relawan dari berbagai ormas untuk membantu saudaranya yang sedang kesusahan tanpa melihat status dan identitas dari orang tersebut.²⁹

Namun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa konflik mengatasnamakan agama masih terjadi hingga saat ini di Indonesia. Padahal semua agama mengajarkan nilai-nilai penuh kebaikan, tetapi kenyataannya seiring dijumpai tidak sedikit kelompok atau individu dengan mengatasnamakan agama justru berbuat intoleran, konflik, melakukan berbagai kekerasan dan kerusakan, sehingga agama yang diyakini anti kekerasan tersebut sering kali dituding dan harus bertanggung jawab terhadap kekerasan dan kerusakan yang dilakukan penganutnya. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan semua masyarakat Indonesia untuk menyadarkan orang-orang intoleran dengan terus mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama agar dapat mengurangi konflik dengan mengatasnamakan agama.

²⁹ Ibid., 28-29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian penulisan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam menanggapi strategi penguatan moderasi beragama, Kementerian Agama menempatkan moderasi beragama sebagai salah satu fokus utama dalam kebijakan dan program kerjanya, menggambarkan perlunya bersikap toleran kepada agama lain, hal tersebut mencakup pengetahuan tentang keyakinan dan praktik beragama yang moderat, membantu mencegah dan mengatasi konflik agama di masyarakat, memperkuat kerjasama dan dialog antara pemuka agama, para budayawan lokal, dan pemerintah, serta memainkan peran penting dalam menyediakan pendidikan dan pembinaan yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat Indonesia.

2. Dalam Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough menawarkan model tiga dimensi, yakni dimensi Teks, Praktik Wacana dan Sosiokultural. Dimensi teks pada strategi penguatan moderasi beragama menyimpulkan bahwa semua strategi Kemenag bertujuan untuk bersikap toleran kepada umat beragama lain. Dimensi praktik wacana menyimpulkan bahwa dalam strategi penguatan moderasi beragama secara umum masyarakat Indonesia setuju terhadap kebijakan Kemenag tersebut, namun terdapat beberapa oknum atau kelompok yang kurang setuju terhadap salah satu kebijakan tersebut. Pada dimensi praktik sosiokultural yang mewakili tiga aspek yang harus dianalisis, yakni aspek situasional,

institusional dan sosial. Aspek situasional Masyarakat Indonesia sangat beragam, tidak hanya dalam hal bahasa, ras, dan budaya, tetapi juga dalam hal agama. Yakni, Islam, Kristen, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan berbagai aliran-aliran kepercayaan lainnya. Kemudian Agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Aspek institusional Kemenag memainkan peranan penting baik secara internal maupun eksternal dalam memperkuat moderasi beragama. Aspek sosial terdapat tantangan dalam mempromosikan moderasi beragama seperti *pertama*, munculnya berbagai aliran ekstrem dengan mengatasnamakan agama. *Kedua*, munculnya politik identitas berbasis agama. *Ketiga*, penyingkiran otoritas keagamaan di era disrupsi. Namun tantangan tersebut dapat diantisipasi dampaknya. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia sudah menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi akan ada saja oknum yang berusaha untuk memecah belah persatuan demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

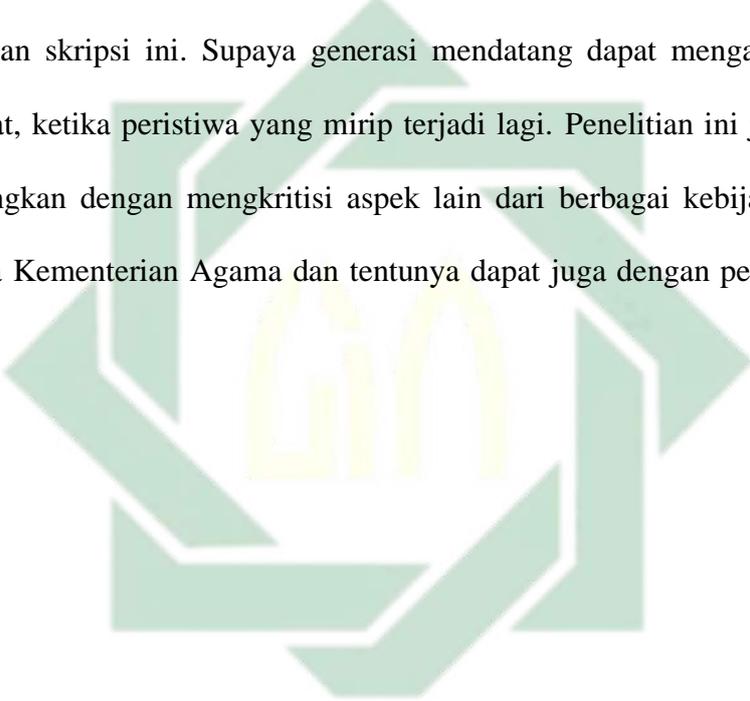
B. Saran

Berdasarkan pada penelitian terkait Strategi Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough” maka penulis ingin memberikan beberapa saran mengenai hal tersebut, diantaranya:

1. Bagi masyarakat umum, teknik analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough untuk memahami berbagai wacana yang memiliki dampak terhadap kehidupan sosial dapat diterapkan sebagai alat analisis untuk mengupas wacana tertentu, sehingga masyarakat dapat menanggapi secara lebih kritis.

2. Menurut penulis, penerapan analisis Norman Fairclough akan membantu para akademisi agar tidak mudah terprovokasi dan dapat memberikan tanggapan terbaik dalam menindaklanjuti suatu wacana agar masyarakat dapat memahami peristiwa yang sebenarnya terjadi.

3. Generasi mendatang harus dapat belajar dari hal-hal yang telah terjadi berkat penyusunan skripsi ini. Supaya generasi mendatang dapat mengambil tindakan yang tepat, ketika peristiwa yang mirip terjadi lagi. Penelitian ini juga bisa terus dikembangkan dengan mengkritisi aspek lain dari berbagai kebijakan moderasi beragama Kementerian Agama dan tentunya dapat juga dengan pendekatan yang lain juga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Laporkan Analisis Perkembangan Aksi Terorisme di Indonesia, BNPT Melalui Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Hadiri RDP Dengan Komisi III DPR RI". <https://www.bnpt.go.id/laporkan-analisis-perkembangan-aksi-terorisme-di-indonesia-bnpt-melalui-deputi-bidang-penindakan-dan-pembinaan-kemampuan-hadiri-rdp-dengan-komisi-iii-dpr-ri>. Diakses pada 15 Desember 2022.
- Admin. "Risalah Tegalsari Kritik Moderasi Beragama". <https://www.pesantrenmuadalah.id/berita/risalah-tegalsari-kritik-moderasi-beragama/>. Diakses pada 5 Juli 2023.
- Al-Barbasy, Ma'mun Murod. "Moderasi Beragama Tanpa Makna", <https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpa-makna/>, diakses pada 15 Juli 2023.
- Aswar, Hasbi. "Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia." *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, Vol. 1, No. 2, Agustus, 2016.
- Aziz, Aceng Abdul. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2019.
- Bakar, Abu. "Konsep Toleransi dan Kebebasan Agama." *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2015.
- Caesareka, Yoga Walanda, dan Catur Nugroho. "Komodifikasi Agama pada Produk Fashion (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Desain Kaus 'Keepers of the Deen')." *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Cahyadi, Ashadi. "Pengembangan Dakwah Melalui Gerakan Kebudayaan." *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, Vol. 18, No. 2, Agustus, 2018.
- Ernawam, Donny. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Vol. 32, No. 1, Desember, 2017.
- Fairclough, Norman. "Critical Discourse Analysis", dalam *The Routledge*

- Handbook Of Discourse Analysis*, ed. J. P. Gee. New York: Routledge, 2012.
- Fairclough, Norman. *Critical discourse analysis: the critical study of language*. Language in social life series. London ; New York: Longman, 1995
- Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Cetakan Kedua. London: Routledge, 2013.
- Fairclough, Norman. *Language and Power: Relasi bahasa, Kekuasaan dan Ideologi*, terj. Indah Rohmani. Malang: Boyan Publishing, 2003.
- Futaqi, Sauqi dan Mashuri, Saepudin. "Religious Moderation Cyber: Sebuah Strategi Pengarusutamaan Melalui Literasi Media Baru," *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 15, No. 2, Juli, 2021.
- Haryatmoko, *Critical discourse analysis (analisis wacana kritis): landasan teori, metodologi dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Hasan, Abi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5, No. 1, Juni, 2022.
- Heriagus, Alfin. "*Donasi Sosial Sebagai Modus Pendanaan Terorisme di Indonesia*".
<https://www.ui.ac.id/donasi-sosial-sebagai-modus-pendanaan-terorisme-di-indonesia/>. Diakses pada 5 Juli 2023.
- Kontributor, "*Kemenag Kenalkan Moderasi Beragama pada Dunia Islam*",
<https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-kenalkan-moderasi-beragama-pada-dunia-islam-0awac8>, diakses pada tanggal 7 Juli 2023.
- Kristina, Diah. *Analisis wacana kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Kusnandar, Viva Budy. "*Persentase Pemeluk Agama di Indonesia (31/12/31)*"
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>. Diakses pada 17 Juni 2023.
- Kusumohamidjojo, B., *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo. 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A